



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 102 TAHUN 2019**

**TENTANG**

STANDARISASI PENOMORAN NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan naskah dinas yang tertib secara administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan standarisasi penomoran naskah dinas pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Penomoran Naskah Dinas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 80);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI PENOMORAN NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
9. Lembaga selain PD adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang dalam penyelenggaraan kegiatan berada di bawah pembinaan dan koordinasi Pemerintah Daerah.
10. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
11. Penomoran Naskah Dinas adalah informasi tertulis penomoran PD sebagai alat komunikasi nomor PD yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan naskah dinas.

**Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi PD dalam penyelenggaraan persuratan dan pengelolaan Naskah Dinas.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan kearsipan dalam pengelolaan Naskah Dinas pada PD.

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup**

**Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penomoran Naskah Dinas;
- b. pencantuman nomor; dan
- c. pengelolaan nomor. *ay*

**BAB II**  
**PENOMORAN NASKAH DINAS**  
**Pasal 5**

- (1) Penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
- a. nomor kode klasifikasi;
  - b. nomor urut surat;
  - c. nomor kode PD;
  - d. nomor kode perjanjian; dan
  - e. tahun pembuatan.
- (2) Nomor kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dicantumkan sesuai permasalahan dan substansi Naskah Dinas dengan berpedoman pada Kode Klasifikasi Kearsipan.
- (3) Kode Klasifikasi Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Nomor urut surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicantumkan sesuai dengan urutan kronologis dalam buku surat keluar PD.
- (5) Nomor kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dicantumkan sesuai dengan kode PD/UPTD/Cabang Dinas pengolah Naskah Dinas.
- (6) Kode PD/UPTD/Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Nomor kode perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dicantumkan pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan perjanjian.
- (8) Tahun pembuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dicantumkan sesuai dengan tahun pembuatan pada Naskah Dinas yang berbentuk perjanjian.

**BAB III**  
**PENCANTUMAN NOMOR**  
**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara**  
**Pasal 6**

- (1) Pencantuman nomor Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disesuaikan dengan bentuk dan susunan Naskah Dinas.
- (2) Tata cara pencantuman nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berurutan dengan dipisahkan tanda garis miring (/) dan letaknya disesuaikan dengan format Naskah Dinas.
- (3) Teknik pencantuman nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. *✓*

**Bagian Kedua**  
**Penomoran**

**Pasal 7**

Penomoran terhadap Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dan instruksi Gubernur dicantumkan secara berurutan yang terdiri atas:

- a. nomor kode klasifikasi;
- b. nomor urut surat; dan
- c. nomor kode PD.

**Pasal 8**

- (1) Penomoran terhadap Naskah Dinas dengan bentuk dan susunan perjanjian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. perjanjian yang ditandatangani oleh Gubernur, penomoran dicantumkan secara berurutan terdiri atas:
    1. kode klasifikasi;
    2. nomor urut;
    3. nomor kode perjanjian; dan
    4. tahun pembuatan.
  - b. perjanjian yang ditandatangani oleh pimpinan PD atas nama Gubernur dalam kedudukan dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, penomoran dicantumkan secara berurutan terdiri atas:
    1. nomor kode klasifikasi;
    2. nomor urut surat ;
    3. nomor kode PD; dan
    4. tahun pembuatan.
- (2) Nomor kode perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN NOMOR**

**Pasal 9**

Pengelolaan nomor Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dan instruksi Gubernur menjadi tugas, tanggungjawab dan fungsi ketatausahaan pada PD dengan memperhatikan prinsip koordinasi secara vertikal dan horizontal.

**Pasal 10**

Pengelolaan nomor Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan perjanjian yang ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan PD atas nama Gubernur menjadi tugas dan tanggungjawab dari unit pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang ekonomi dan kerjasama.

**Pasal 11**

- (1) Penomoran Naskah Dinas pada UPTD/Cabang Dinas dan lembaga selain PD ditetapkan oleh masing-masing UPTD/Cabang Dinas dan lembaga bersangkutan. **4**

(2) Nomor kode PD yang tercantum dalam penomoran Naskah Dinas pada UPTD/Cabang Dinas dan lembaga selain PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh PD induk.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 November 2019

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 28 November 2019

SEKRETARIS DAERAH

a PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 102

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : 102 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2019

**KODE KLASIFIKASI**

<b>KODE</b>	<b>URUSAN</b>	
<b>000</b>	<b>UMUM</b>	
001	Lambang Arsip atau naskah yang berhubungan dengan Lambang :	
	.1	Garuda
	.2	Bendera Kebangsaan
	.3	Lagu Kebangsaan
	.4	Lambang Daerah
	1	Provinsi
	2	Kabupaten/ Kota
002	Tanda kehormatan/Penghargaan (Untuk tanda kehormatan/penghargaan Pegawai lihat 861) Arsip atau naskah yang berhubungan dengan penghargaan :	
	.1	Bintang
	.2	Satyalencana
	.3	Samkarya Nugraha Monumen
	.4	Samkarya Nugraha
	.5	Penghargaan secara adat
	.6	Penghargaan lainnya.
003	Peringatan Hari Besar Arsip atau naskah yang berhubungan dengan :	
	.1	Hari Besar Nasional 17 Agustus Hari Pahlawan dan sebagainya.
	.2	Hari Raya/Besar Keagamaan
	.3	HUT
	.4	Hari Besar Internasional
004	Ucapan Arsip atau naskah yang berhubungan dengan :	
	.1	ucapan terima kasih
	.2	ucapan selamat
	.3	ucapan belasungkawa
	.4	ucapan lainnya.
005	Undangan	
006	Tanda Jabatan	
	.1	Pamong Praja

	.2	Tanda Pengenal
	.3	Pejabat lainnya
007	-	
008	-	
009	-	
<b>010</b>	<b>URUSAN DALAM</b>	Gedung Kantor/Termasuk instalasi Prasarana Fisik Pamong
011	Kantor Dinas	Arsip atau naskah yang berhubungan dengan Kantor Dinas
012	Rumah Dinas	Arsip atau naskah yang berhubungan dengan :
	.1	Tanah untuk rumah dinas
	.2	Perabot Rumah Dinas.
	.3	Rumah Dinas Gol. I
	.4	Rumah Dinas Gol. II
	.5	Rumah Dinas Gol. III
	.6	Rumah/ Bangunan lainnya
	.7	Rumah Pejabat Negara
013	Mess/guest house	
014	Rumah Susun/ Apartemen	
015	Penerangan listrik/ Jasa Listrik	
016	Telepon/ Faximile/ Internet	
017	Keamanan/ketertiban kantor	
018	Kebersihan kantor	
019	Protokol	Arsip atau naskah yang berhubungan dengan :
	.1	Upacara bendera
	.2	Tata tempat
	1	Pemasangan gambar Presiden/Wakil Presiden
	.3	Audensi/ Menghadap Pimpinan
	.4	Alamat-alamat kantor pejabat
	.5	Bandir/ Umbul-umbul/ Spanduk
<b>020</b>	<b>PERALATAN</b>	
	.1	Penawaran
021	Alat tulis	
022	Mesin kantor	
023	Perabot kantor	
024	Alat angkutan	
025	Pakaian dinas	
026	Senjata	
027	Pengadaan	
028	Inventaris	
029	-	

<b>030</b>	<b>KEKAYAAN DAERAH</b>	
031	Sumber Daya Alam	
032	Asset Daerah	
033	-	
034	-	
035	-	
036	-	
037	-	
038	-	
039	-	
<b>040</b>	<b>PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI</b>	
041	Perpustakaan Arsip atau naskah yang berhubungan dengan :	
	.1	Perpustakaan Umum
	.2	Khusus
	.3	Perguruan Tinggi
	.4	Sekolah
	.5	Keliling
	.6	Sumbangan Buku
042	Dokumentasi	
043	-	
044	-	
045	Kearsipan Arsip atau naskah yang berhubungan dengan kearsipan meliputi :	
	.1	Pola Klasifikasi
	.2	Penataan Berkas
	.3	Penyusutan Arsip
	1	Jadwal Retensi Arsip
	2	Pemindahan Arsip
	3	Penilaian Arsip
	4	Pemusnahan Arsip
	5	Penyerahan Arsip
	6	Berita Acara Penyusutan Arsip
	7	Daftar Pencarian Arsip
	.4	Pembinaan Kearsipan
	1	Bimbingan Teknis
	.5	Pemeliharaan/ Perawatan Arsip
	.6	Pengawetan/Fumigasi
046	Sandi	
047	Website	
048	Pengelolaan Data	
049	Jaringan Komunikasi Data	

<b>050</b>	<b>PERENCANAAN</b>				
	Arsip atau naskah yang berhubungan dengan perencanaan meliputi :				
	.1	Repelita / 8 sukses			
	1	Renstra Daerah RPJP RPJM RPJMD Musrenbang			
	2	Bantuan Pembangunan Daerah			
	3	BAPPEDA			
	.2	laporan fisik dan keuangan kegiatan.			
051	Bidang Pemerintahan Digunakan untuk urusan/ masalah pemerintahan yang bersifat fasilitatif (penunjang). Untuk perincian urusan bidang pemerintah yang bersifat substantif (pokok) menggunakan kode klasifikasi 100.				
052	Bidang Politik Digunakan untuk urusan/ masalah politik yang bersifat fasilitatif (penunjang). Untuk perincian urusan bidang politik yang bersifat substantif (pokok) menggunakan kode klasifikasi 200				
053	Bidang Keamanan dan Ketertiban Digunakan untuk urusan/ masalah keamanan dan ketertiban yang bersifat fasilitatif (penunjang). Untuk perincian urusan bidang keamanan dan ketertiban yang bersifat substantif (pokok) menggunakan kode klasifikasi 300.				
054	Bidang Kesejahteraan Digunakan untuk urusan/ masalah kesejahteraan yang bersifat fasilitatif (penunjang). Untuk perincian urusan bidang kesejahteraan yang bersifat substantif (pokok) menggunakan kode klasifikasi 400				
055	Bidang Perekonomian Digunakan untuk urusan/ masalah perekonomian yang bersifat fasilitatif (penunjang). Untuk perincian urusan bidang perekonomian yang bersifat substantif (pokok) menggunakan kode klasifikasi 500				
056	Bidang Pekerjaan Umum Digunakan untuk urusan/ masalah pekerjaan umum yang bersifat fasilitatif (penunjang). Untuk perincian urusan bidang pekerjaan umum yang bersifat substantif (pokok) menggunakan kode klasifikasi 600				
057	Bidang Pengawasan Digunakan untuk urusan/ masalah pengawasan yang bersifat fasilitatif (penunjang). Untuk perincian urusan bidang pengawasan yang bersifat substantif (pokok) menggunakan kode klasifikasi 700				
058	Bidang Kepegawaian Digunakan untuk urusan/ masalah kepegawaian yang bersifat fasilitatif (penunjang). Untuk perincian urusan bidang kepegawaian yang bersifat substantif (pokok) menggunakan kode klasifikasi 800				
059	Bidang Keuangan Digunakan untuk urusan/ masalah keuangan yang bersifat fasilitatif (penunjang). Untuk perincian urusan bidang keuangan yang bersifat substantif (pokok) menggunakan kode klasifikasi 900				
<b>060</b>	<b>ORGANISASI/KETATALAKSANAAN</b>				
	.1	Program Kerja			
061	Organisasi Instansi Pemerintah (struktur organisasi)				
	.1	Susunan tata kerja			
	.2	tata tertib kantor jam kerja dan lain-lain			
062	Organisasi Badan Non Pemerintah				
063	Organisasi Badan Internasional				

064	Organisasi Semi Pemerintah BKS-AKSI
065	Ketatalaksanaan / Tata Naskah / Sistem
066	Stempel Dinas
067	Pelayan Umum/ Pelayanan Publik/ Analisis
068	Komputerisasi
069	Standar Pelayanan Minimal
<b>070</b>	<b>PENELITIAN</b>
071	Riset Ijin Riset, Hasil Riset, dsb.
072	Survey Ijin Survey, Hasil Survey dsb.
073	Kajian
074	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi
<b>080</b>	<b>KONFERENSI / RAPAT / SEMINAR</b>
081	Gubernur
082	Bupati/Walikota
083	Komponen Eselon lainnya
084	Instansi lainnya
087	-
088	-
089	-
090	Perjalanan Dinas Klasifikasikan disini perjalanan dinas pegawai pemerintah daerah/kabupaten.
093	Perjalanan Dinas Pegawai Eselon I
094	Perjalanan pegawai termasuk pemanggilan pegawai
098	Perjalanan pejabat ke luar negeri
099	Perjalanan pegawai ke luar negeri
<b>100</b>	<b>PEMERINTAHAN</b>
.1	Tata Praja
.2	Legislatif
.3	Yudikatif
.4	Hubungan Luar Negeri
<b>120</b>	<b>PEMERINTAH PROVINSI</b>
	Arsip atau naskah yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi meliputi :
.04	Laporan daerah
	2 Monografi tambahkan kode wilayah
.1	Koordinasi
.2	Instansi Tingkat Provinsi
	1 Dinas Otonomi
	2 Dinas Vertikal
	3 Kerjasama antar Provinsi/ Kabupaten

121	Gubernur Nusa Tenggara Timur ( kode wilayah 53). Tambahkan dibelakang kode klasifikasi.	
	.1	Pencalonan
	.2	Pengangkatan
	.3	Meninggal
	.4	Pelantikan
	.5	Pemberhentian
	.6	Serah Terima Jabatan
122	Wakil Gubernur meliputi :	
	.1	Pencalonan
	.2	Pengangkatan
	.3	Meninggal
	.4	Pelantikan
	.5	Pemberhentian
	.6	Serah terima jabatan
123	Sekretaris Daerah Provinsi meliputi :	
	.1	Pencalonan
	.2	Pengangkatan
	.3	Meninggal
	.4	Pelantikan
	.5	Pemberhentian
	.6	Serah terima jabatan
124	Badan – badan Pertimbangan Daerah meliputi Forkominda	
125	Pembentukan/pemekaran wilayah Arsip atau naskah yang berhubungan dengan :	
	.1	Pembentukan/pemekaran wilayah meliputi Pembinaan/Perubahan Nama kepada :
	1	Daerah
	2	Kota
	3	Benda Geografis
	4	Gunung
	5	Sungai
	6	Pulau
	7	Selat
	8	Batas Laut.
	.2	Pembentukan Wilayah
	.3	Pemindahan Ibukota
	.4	Perubahan Batas Wilayah
	.5	Pemekaran Wilayah
	.6	Forum Koordinasi Lainnya
126	Pembagian wilayah	
127	Penyerahan urusan	
128	Swapraja/ Penataan Wilayah/ Daerah	
129	-	
<b>130</b>	<b>PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA</b>	
131	Bupati /Walikota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi:	
	.1	Pencalonan
	.2	Pengangkatan

	.3	Meninggal
	.4	Pelantikan
	.5	Pemberhentian
	.6	Serah Terima Jabatan
132		Sambutan/ Pengarahan/ Amanat Wakil Bupati/ Walikota, Tambahkan Kode Wilayah, meliputi :
	.1	Pencalonan
	.2	Pengangkatan
	.3	Meninggal
	.4	Pelantikan
	.5	Pemberhentian
	.6	Serah Terima Jabatan
133		Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota Tambahkan Kode Wilayah, meliputi :
	.1	Pencalonan
	.2	Pengangkatan
	.3	Meninggal
	.4	Pelantikan
	.5	Pemberhentian
	.6	Serah Terima Jabatan
134		Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
	.1	Muspida
	.2	Forum Panitia Anggaran Nasional
	.3	Forum Koordinasi Lainnya
	.4	Kerjasama antar Kabupaten/ Kota
135		Pembentukan/ Pemekaran Wilayah
	.1	Pemindahan Ibukota
	.2	Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota
	.3	Pemabagian Wilayah Kabupaten/Kota
	.4	Perubahan Batas Wilayah
	.5	Pemekaran Wilayah
	.6	Permasalahan Batas Wilayah
	.7	Pembentukan Ibukota Kabupaten/Kota
	.8	Pemberian dan Penggantian Nama Kabupaten/Kota, Daerah, Jalan
136		Pembagian Wilayah
137		Penyerahan Urusan
138		Pemerintah Wilayah Kecamatan
	.1	Sambutan / Pengarahan / Amanat
	.2	Pembentukan Kecamatan
	.3	Pemekaran Kecamatan
	.4	Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan
	.5	Pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kemantren
	.6	-
	.7	-
139		
<b>140</b>	<b>PEMERINTAH DESA / KELURAHAN</b>	
141		Pamong Desa meliputi :
	.1	Pencalonan

	.2	Pengangkatan
	.3	Meninggal
	.4	Pelantikan
	.5	Pemberhentian
142		Penghasilan Pamong Desa
143		Kekayaan Desa
144		Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa
145		Administrasi Desa
146		Kewilayahan <ul style="list-style-type: none"> <li>.1 Pembentukan Desa/Kelurahan</li> <li>.2 Pemekaran Desa/Kelurahan</li> <li>.3 Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan</li> <li>.4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan</li> <li>.5 Kerjasama Antar Desa / Kelurahan</li> </ul>
147		Lembaga- lembaga Tingkat Desa
<b>160</b>		<b>DPRD PROVINSI</b>
161		Keanggotaan DPRD Provinsi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>.1 Pencalonan</li> <li>.2 Pengangkatan</li> <li>.3 Pemberhentian</li> <li>.4 Recall</li> <li>.5 Meninggal</li> <li>.6 Pelanggaran</li> </ul>
162		Persidangan <ul style="list-style-type: none"> <li>.1 Reses</li> </ul>
163		Kesejahteraan <ul style="list-style-type: none"> <li>.1 Keuangan</li> <li>.2 Penghargaan</li> </ul>
164		Hak
165		Sekretaris DPRD Provinsi
<b>180</b>		<b>HUKUM</b>
	.1	Konstitusi <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Dasar Hukum</li> <li>2 Undang- Undang Dasar</li> </ul>
	.2	GBHN
	.3	Amnesty, Abolisi, Grasi
181		Perdata <ul style="list-style-type: none"> <li>.1 Tanah</li> <li>.2 Rumah</li> <li>.3 Utang/ Piutang               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Hipotik</li> <li>2 Gadai</li> </ul> </li> <li>.4 Notariat</li> </ul>
182		Pidana <ul style="list-style-type: none"> <li>.1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS)</li> </ul>

183	Peradilan
184	Hukum Internasional
185	Imigrasi
	.1 Visa
	.2 Passport
	.3 Exit
	.4 Reentry
	.5 Lintas Batas/ Batas Antar Negara
186	Kepenjaraan
187	Kejaksaan
188	Peraturan Perundang- Undangan .
	.1 TAP MPR
	.2 Undang- undang Dasar
	.3 Peraturan
	1 Peraturan Pemerintah
	2 Peraturan Menteri
	3 Peraturan Lembaga Non Kementerian
	4 Peraturan Daerah
	1 Peraturan Provinsi
	2 Peraturan Kabupaten/ Kota
	.4 Keputusan
	1 Presiden
	2 Menteri
	3 Lembaga Non Departemen
	4 Gubernur
	5 Bupati/ Walikota
	.5 Instruksi
	1 Presiden
	2 Menteri
	3 Lembaga Non Departemen
	4 Gubernur
	5 Bupati/ Walikota
189	Hukum Adat
	1 Tokoh Adat/ Masyarakat
<b>190</b>	<b>HUBUNGAN LUAR NEGERI</b>
191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama Dengan Negara Asing
	1 Asean
	2 Bantuan Luar Negeri/ Hibah
194	Perwakilan RI di Luar Negeri
195	PBB
196	Laporan Luar Negeri
197	Hutang Luar Negeri PHLN/ LOAN
198	-
199	-

<b>200</b>	<b>POLITIK</b>
<b>210</b>	<b>KEPARTAIAN</b>
211	Lambang Kepartaian
212	Kartu Tanda Anggota
213	Bantuan Keuangan Parpol
<b>220</b>	<b>ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>
221	Berdasarkan perjuangan
	.1 Perintis Kemerdekaan
	.2 Angkatan 45
	.3 Veteran
222	Berdasarkan Kekaryaan
	.1 PEPABRI
	.2 Wredatama
223	Berdasarkan Kerohanian
224	Lembaga Adat
225	Lembaga Swadaya Masyarakat
226	-
<b>230</b>	<b>ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL</b>
232	Persatuan Guru Republik Indonesia
231	Ikatan Dokter Indonesia
232	Persatuan Guru Republik Indonesia
233	PERSATUAN SARJANA HUKUM INDONESIA
234	Persatuan Advokat Indonesia
235	Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
236	Korps Pegawai Republik Indonesia
237	Persatuan Wartawan Indonesia
238	Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia
239	Organisasi Profesi dan Fungsional lainnya
<b>240</b>	<b>ORGANISASI PEMUDA</b>
241	Komite Nasional Pemuda Indonesia
242	Organisasi Mahasiswa
243	Organisasi Pelajar
244	Gerakan Pemuda Anshor
245	Gerakan Pemuda Islam Indonesia
246	Gerakan Pemuda Marhaenis
247	-
248	-
<b>250</b>	<b>ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN</b>
251	Federasi Buruh Seluruh Indonesia
252	Organisasi Buruh Internasional
253	Himpunan Kerukunan Tani
254	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
255	Keluarga Sopir Proporsional Indonesia
256	-
257	-
258	-

259	-
<b>260</b>	<b>ORGANISASI WANITA</b>
261	Dharma Wanita
262	Persatuan Wanita Indonesia
263	Pemberdayaan Perempuan (wanita)
264	Kongres Wanita
265	-
266	-
267	-
265	-
268	-
269	-
<b>270</b>	<b>PEMILIHAN UMUM</b>
271	Pencalonan
272	Nomor Urut Partai / Tanda Gambar
273	Kampanye
274	Petugas Pemilu
275	Pemilih / Daftar Pemilih
276	Sarana
.1	TPS
.2	Kendaraan
.3	Surat Suara
.4	Kotak Suara
.5	Dana
277	Pemungutan Suara / Perhitungan Suara
278	Penetapan Hasil Pemilu
279	Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan Calon Terpilih
280	-
281	-
282	-
283	-
284	-
<b>300</b>	<b>KEAMANAN/ KETERTIBAN</b>
301	Keamanan
302	Ketertiban
303	-
<b>310</b>	<b>PERTAHANAN</b>
311	Darat
312	Laut
313	Udara
314	Perbatasan
315	-
316	-
317	-

<b>320</b>	<b>KEMILITERAN</b>
321	Latihan Militer
322	Wajib Militer
323	Operasi Militer
324	Kekaryaan TNI Pejabat Sipil dari TNI
.1	TMD
325	-
326	-
327	-
328	-
<b>330</b>	<b>KEAMANAN</b>
331	Kepolisian
.1	Polisi Pamong Praja
.2	Karma
.3	Kamling
.4	Jaga Wana
332	Huru-Hara/ Demonstrasi
333	Senjata Api Tajam
334	Bahan Peledak
335	Perjudian
336	Surat- surat Kaleng
337	Pengaduan
338	Himbauan/ Larangan
339	Teroris
<b>340</b>	<b>PERTAHANAN SIPIL</b>
341	Perlindungan Sipil
<b>350</b>	<b>KEJAHATAN</b>
351	Makar/ Pemberontakan
352	Pembunuhan
353	Penganiayaan Pencurian
354	Subversi/ Penyelundupan/ Narkotika
355	Pemalsuan
356	Korupsi/ Penyelewengan/ Penyalahgunaan Jabatan/ KKN
357	Pemerkosaan/ Perbuatan Cabul
358	Kenakalan
359	Kejahatan lainnya
<b>360</b>	<b>BENCANA</b>
361	Gunung Berapi/ Gempa
362	Banjir/ Tanah Longsor
363	Angin Topan
364	Kebakaran
.1	Pemadam Kebakaran
365	Kekeringan
366	Tsunami
<b>370</b>	<b>KECELAKAAN/ SAR</b>
371	Darat
372	Udara

373	Laut	
374	Sungai/ Danau	
<b>400</b>	<b>KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	
401	Keluarga Miskin	
402	PNPM Mandiri Pedesaan	
403	-	
404	-	
<b>410</b>	<b>PEMBANGUNAN DESA</b>	
411	Pembinaan Usaha Gotong Royong	
	.1	Swadaya Gotong Royong
	1	Penataan Gotong Royong
	2	Gotong Royong Dinamis
	3	Gotong Royong Statis
	4	Pungutan
	.2	Lembaga Sosial Desa
	1	Pembinaan
	2	Klasifikasi
	3	Proyek
	4	Musyawarah
	.3	Latihan Kerja Masyarakat
	1	Kader Masyarakat
	2	Kuliah Kerja Nyata ( KKN)
	3	Pusat Latihan
	4	Kursus-kursus
	5	Kurikulum/ Sylabus
	6	Keterampilan
	7	Pramuka
	.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
	1	Program
	2	Pembinaan Organisasi
	3	Kegiatan
	.5	Penyuluhan
	1	Publikasi
	2	Peragaan
	3	Sosio Drama
	4	Siaran Pedesaan
	5	Penyuluhan Lapangan
	6	Keterampilan
	.6	Kelembagaan Desa
	1	Kelompok Tani
	2	Rukun Tani
	3	Subak
	4	Dharma Tirta
412	Perekonomian Desa	
	.1	Produksi Desa
	1	Pengolahan

		2	Pemasaran
	.2	Keuangan Desa	
	1	Perkreditan Desa	
	2	Inventarisasi Data	
	3	Perkembangan/ Pelaksanaan	
	4	Bantuan/ Stimulan	
	5	Petunjuk/ pembinaan Pelaksanaan	
	6	Keterampilan	
	.3	Koperasi Desa	
	1	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)	
	2	Koperasi Usaha Desa	
	.4	Penataan Bantuan Pembangunan Desa	
	1	Jumlah Desa yang diberi Bantuan	
	2	Pengarahan	
	3	Pusat	
	4	Daerah	
	.5	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa	
	1	Pusat	
	2	Daerah	
	.6	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa	
	1	Bantuan Langsung	
	2	Bantuan Keserasian	
	3	Bantuan Juara Lomba Desa	
413		Prasarana Desa	
	.1	Prasarana Desa	
	1	Pembinaan	
	2	Bimbingan Teknis	
	.2	Pemukiman Kembali Penduduk	
	1	Lokasi	
	2	Diskusi	
	3	Pelaksanaan	
	.3	Masyarakat Pradesa	
	1	Pembinaan	
	2	Penyuluhan	
	.4	Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa	
	1	Rumah Sehat	
	2	Proyek Perintis	
	3	Pelaksanaan	
	4	Pengembangan	
	5	Perbaikan Kampung	
414		Pengembangan Desa	
	.1	Tingkat Perkembangan Desa	
	1	Jumlah Desa	
	2	Pemekaran Desa	
	3	Pembentukan Desa Baru	
	4	Evaluasi	
	5	Bagan	
	.2	Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)	

		1	Penyuluhan Program
		2	Lokasi UDKP
		3	Pelaksanaan
		4	Bimbingan/ Pembinaan
		5	Evaluasi
	.3	Tata Desa	
		1	Inventarisasi
		2	Penyusunan Pola Tata Desa
		3	Aplikasi Tata Desa
		4	Pemetaan
		5	Pedoman Pelaksanaan
		6	Evaluasi
	.4	Perlombaan Desa	
		1	Pedoman
		2	Penilaian
		3	Kejuaraan
		4	Piagam
415	Koordinasi		
	.1	Sektor Khusus	
	.2	Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)	
	.3	Tim Koordinasi Pusat (TKP)	
	.4	Kerjasama	
		1	Luar Negeri (UNICEF)
		2	Perguruan Tinggi
		3	Kementerian/ Lembaga Non Kementerian
416	-		
417	-		
418	-		
<b>420</b>	<b>PENDIDIKAN</b>		
421	Sekolah		
	.1	Pra Sekolah	
	.2	Sekolah Dasar	
	.3	Sekolah Menengah	
	.4	Sekolah Tinggi	
	.5	Sekolah Kejuruan	
	.6	Kegiatan Sekolah, Dies Natalis, Lustrum	
	.7	Kegiatan Pelajar	
		1	Reuni Darmawisata
		2	Pelajar Teladan
		3	Resimen Mahasiswa
	.8	Sekolah Pendidikan Luar Biasa	
	.9	Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf	
422	Administrasi Sekolah Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran		
	.1	Mapras, Perploncoan	
	.2	Tahun Pelajaran	
	.3	Hari Libur	

	.4	Uang Sekolah/ SPP
	.5	Beasiswa
423		Metode Belajar
	.1	Kuliah
	.2	Ceramah, symposium
	.3	Diskusi
	.4	Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Study Tour
	.5	Kurikulum
	.6	Karya Tulis
	.7	Ujian
424		Tenaga Pengajar : Guru
425		Sarana Pendidikan
	.1	Gedung
	1	Gedung Sekolah
	2	Kampus
	3	Pusat Kegiatan Mahasiswa
	.2	Buku
	.3	Perlengkapan Sekolah
426		Keolahragaan
	.1	Cabang Olahraga
	.2	Sarana
	1	Gedung Olahraga
	2	Stadion
	3	Lapangan
	4	Kolam Renang
	.3	Pesta Olahraga
	.4	KONI
427		Organisasi dan Kegiatan Remaja
428		Kepramukaan
429		Pendidikan Kedinasan untuk Depdagri, lihat 890
<b>430</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	
431		Kesenian
	.1	Cabang Kesenian
	.2	Sarana
	1	Gedung Kesenian
432		Kepurbakalaan
	.1	Museum
	.2	Peninggalan Kuno
	1	Candi termasuk Pemugaran
	2	Benda
433		Sejarah
434		Bahasa
435		Usaha Pertunjukkan, Hiburan, Kesenangan
436		Kepercayaan
437		-
438		-
439		-

<b>440</b>	<b>KESEHATAN</b>	
441	Pembinaan Kesehatan	
	.1	Gizi
	.2	Mata
	.3	Jiwa
	.4	Kanker
	.5	UKS
	.6	Perawatan
	.7	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
	.8	Pekan Imunisasi Nasional
442	Obat- obatan	
	.1	Pengadaan
	.2	Penyimpanan
443	Penyakit Menular	
	.1	Pencegahan
	.2	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
	1	Kusta
	2	Kelamin
	3	Frambosia
	4	TBC/ AIDS/ HIV
	.3	Epidemiologi dan Karantina ( Epidka)
	1	Kholera
	2	Imunisasi
	3	Survailense
	4	Rabies ( Anjing Gila), Antraks
	.4	Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
	1	Malaria
	2	Dengue Faemorrhagic Fever (Demam Berdarah HDF)
	3	Filarial
	4	Serangga
	.5	Hygiene Sanitasi
	1	Tempat-tempat Pembuatan Dan Penjualan Makanan dan Minuman (TPPMM)
	2	Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (Samijaga)
	3	Pestisida
444	Gizi	
	.1	Kekurangan Makanan Bahaya Kelaparan Busung Lapar
	.2	Keracunan Makanan
	.3	Menu Makanan Rakyat
	.4	Badan Perbaikan Gizi Daerah
	.5	Program Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT- AS)
445	Rumah Sakit, Balai Kesehatan, PUSKESMAS, Puskesmas Keliling, Poliklinik.	
446	Tenaga Medis	
448	Pengobatan Tradisional	
	.1	Pijat

	.2	Tusuk Jarum
	.3	Jamu Tradisional
	.4	Dukun/ Paranormal
<b>450</b>	<b>AGAMA</b>	
451	Agama Islam	
	.1	Peribadatan
	1	Sholat
	2	Zakat Fitrah
	3	Puasa
	4	MTQ
	.2	Rumah Ibadat
	.3	Tokoh Agama
	.4	Pendidikan
	1	Tinggi
	2	Menengah
	3	Dasar
	4	Pondok Pesantren
	5	Gedung Sekolah
	6	Tenaga Pengajar
	7	Buku
	8	Dakwah
	9	Organisasi/ Lembaga Pendidikan
	5	Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dsb
	6	Peradilan
	7	Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama
	8	Mazhab
452	Agama Protestan	
	.1	Peribadatan
	.2	Rumah Ibadat
	.3	Tokoh Agama Rohaniawan Pendeta Domine
	.4	Mazhab
	.5	Organisasi Gerejani
453	Agama Katolik	
	.1	Peribadatan
	.2	Rumah Ibadat
	.3	Tokoh Agama Rohaniawan Pendeta Pastor
	.4	Mazhab
	.5	Organisasi Gerejani
454	Agama Hindu	
	.1	Peribadatan
	.2	Rumah Ibadat
	.3	Tokoh Agama Rohaniawan
	.4	Mazhab
	.5	Organisasi Keagamaan
455	Agama Budha	
	.1	Peribadatan
	.2	Rumah Ibadat

	.3	Tokoh Agama Rohaniawan
	.4	Mazhab
	.5	Organisasi Keagamaan
456	Urusan Haji	
	.1	ONH
	.2	Manasik
457	-	
458	-	
459	-	
<b>460</b>	<b>SOSIAL</b>	
461	Rehabilitasi Penderita Cacat	
	.1	Cacat Mata
	.2	Cacat Tubuh
	.3	Cacat Mental
	.4	Bisu/ Tuli
462	Tuna Sosial	
	.1	Gelandangan
	.2	Pengemis
	.3	Tuna Susila
	.4	Anak Nakal
463	Kesejahteraan Anak/ Keluarga	
	.1	Anak Putus Sekolah
	.2	Ibu Teladan
	.3	Anak Asuh
464	Pembinaan Pahlawan	
	.1	Pahlawan , meliputi Penghargaan Kepada Pahlawan, Tunjangan Kepada Pahlawan Dan Jandanya
	.2	Perintis Kemerdekaan, meliputi Pembinaan, Penghargaan Dan Tunjangan Kepada Perintis
	.3	Cacat Veteran
465	Kesejahteraan Sosial	
	.1	Lanjut Usia
	.2	Korban Kekacauan Pengungsi Repatriasi
466	Sumbangan Sosial	
	.1	Korban Bencana
	.2	Pencarian Dana Untuk Sumbangan
	.3	Penyelenggaran Undian
	.4	Panti Asuhan
	.5	Panti Jompo
467	Bimbingan Sosial	
	.1	Masyarakat Suku Terasing Meliputi: Bimbingan, Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman
468	PMI	
469	Makam	
	.1	Umum
		Pahlawan Meliputi : Penghargaan Kepada Pahlawan
	.2	Tunjangan kepada Pahlawan dan Jandanya

	.3	Khusus Keluarga Raja
	.4	Krematorium
<b>470</b>	<b>KEPENDUDUKAN</b>	
471	Pendaftaran Penduduk	
	.1	Identitas Penduduk
	1	Biodata
	2	Nomor Induk Kepegawaian
	3	Kartu Tanda Penduduk
	4	Kartu Keluarga
	5	Advokasi Identitas Penduduk
	.2	Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
	1	Perpindahan Penduduk WNI
	2	Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia
	3	Perpindahan Penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara
	4	Daerah Terbelakang
	5	Bedol Desa
	.3	Perpindahan Penduduk Antar Negara
	1	Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri
	2	Orang Asing Tinggal Sementara
	3	Orang Asing Tinggal Tetap
	4	Perpindahan Penduduk Antar Negara Di Wilayah Pembatasan Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)
	.4	Pendaftaran Pengungsi Dan Penduduk Rentan
	1	Akibat Bencana Alam
	2	Akibat Kerusuhan Sosial
	3	Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
	4	Pendaftaran Penduduk Rentan
472	Pencatatan Sipil	
	.1	Kelahiran Kematian Dan Advokasi
	1	Kelahiran
	2	Kematian
	3	Advokasi Kelahiran Dan Kematian
	.2	Perkawinan Perceraian Advokasi
	1	Perkawinan Agama Islam
	2	Perkawinan Agama Non Islam
	3	Perceraian Agama Islam
	4	Perceraian Agama Non Islam
	5	Advokasi Perkawinan Dan Perceraian
	.3	Pengangkatan Pengakuan Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta Dan Advokasi
	1	Pengangkatan Anak
	2	Pengakuan Anak
	3	Pengesahan Anak
	4	Perubahan Anak
	5	Pembatalan Anak
	6	Advokasi Pengurusan Pengangkatan Pengakuan Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta

	.4	Pencatatan Kewarganegaraan
	1	Akibat Perkawinan
	2	Akibat Kelahiran
	3	Non Perkawinan
	4	Non Kelahiran
	5	Perubahan WNI ke WNA
473	Informasi Kependudukan	
	.1	Teknologi Informasi
	1	Perangkat Keras
	2	Perangkat Lunak
	3	Jaringan Komunikasi dan Data
	.2	Kelembagaan Dan Sumber Daya Informasi
	1	Daerah Maju
	2	Daerah Berkembang
	3	Daerah Terbelakang
	.3	Pengolahan Data Kependudukan
	1	Pendaftaran Penduduk
	2	Kejadian Vital Penduduk
	3	Penduduk Non Registrasi
	.4	Pelayanan Informasi Kependudukan
	1	Media Elektronik
	2	Media Cetak Outlet
474	Perkembangan Penduduk	
	.1	Pengarahan Kuantitas Penduduk
	1	Struktur Jumlah
	2	Komposisi
	3	Fertilitas
	4	Kesehatan Reproduksi
	5	Morbiditas Penduduk
	6	Mortalitas Penduduk
	.2	Pengembangan Kuantitas Penduduk
	1	Anak dan Remaja
	2	Penduduk Usia Produktif
	3	Penduduk Lanjut Usia
	4	Gender
	.3	Penataan Persebaran Penduduk
	1	Migrasi Antar Wilayah
	2	Migrasi Internasional
	3	Urbanisasi
	4	Sementara
	5	Migrasi Non Permanen
	.4	Perlindungan Pemberdayaan Penduduk
	1	Pengembangan Sistem Pelindungan Penduduk Pelayanan Kelembagaan Ekonomi
	2	Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
	3	Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
	4	Partisipasi Masyarakat

	.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan
	1	Pendidikan Jalur Sekolah
	2	Pendidikan Jalur Luar Sekolah
	3	Pendidikan Jalur Masyarakat
	4	Pembangunan Berwawasan Kependudukan
475		Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan
	.1	Indikator Kependudukan
	1	Perumusan Penetapan dan Pengembangan Indikator Kependudukan
	2	Pemanfaatan Indikator Kependudukan
	3	Sosialisasi Indikator Kependudukan
	.2	Proyeksi Kependudukan
	1	Penyusunan dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan
	2	Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan
	.3	Analisis Dampak Kependudukan
	1	Penyusunan dan Pengembangan
	2	Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan
	.4	Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah
	1	Lembaga Internasional
	2	Lembaga Masyarakat dan Nirlaba
	3	Lembaga Usaha Swasta
	.5	Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah
	1	Lembaga Pemerintah
	2	Pemerintah Provinsi dan Kota
	3	Pemerintah Kabupaten
	.6	Analisis
476		Monitoring
477		Evaluasi
478		Dokumentasi
479		-
<b>480</b>		<b>MEDIA MASSA</b>
489		HUBUNGAN MASYARAKAT
<b>490</b>		<b>PENGADUAN MASYARAKAT</b>
491		-
492		-
<b>500</b>		<b>PEREKONOMIAN</b>
	.1	Dewan Stabilisasi
501		Pengadaan Pangan
502		Pengadaan Sandang
503		Perizinan pada Umumnya Untuk Perizinan Suatu Bidang. Klasifikasikan masalahnya.
504		-
505		-
506		-
507		-

<b>510</b>	<b>PERDAGANGAN</b>		
	.1	Tata niaga	
	1	Promosi perdagangan	
	2	Pekan raya	
	3	Iklan	
	4	Pameran Pameran non komersil	
	.2	Pelelangan	
	.3	Tera	
<b>511</b>	<b>Pemasaran</b>		
	.1	Sembilan bahan pokok: Beras, garam, minyak, tanah, minyak goring, sabun, dsb	
	.2	Pasar	
	.3	Pertokoan	
	.4	kaki lima kios	
<b>512</b>	<b>Ekspor</b>		
<b>513</b>	<b>Impor</b>		
<b>514</b>	<b>Perdagangan antar pulau</b>		
<b>515</b>	<b>Perdagangan antar luar negeri</b>		
<b>516</b>	<b>Pergudangan</b>		
<b>517</b>	<b>Aneka usaha perdagangan</b>		
<b>518</b>	<b>Koperasi : untuk BUUD KUD</b>		
<b>519</b>	<b>-</b>		
<b>520</b>	<b>PERTANIAN</b>		
<b>521</b>	<b>Tanaman pangan</b>		
	.1	Program :	
	1	Bimas/Inmas termasuk kredit	
	2	Penyuluhan	
	.2	Produksi :	
	1	Padi/Panen	
	2	Palawija	
	3	Jagung	
	4	Ketela Pohon/Ubi-ubian	
	5	Holtikultura	
	6	Sayuran Buah-buahan	
	7	Tanaman hias	
	8	Pembudidayaan Rumput Laut Perlebahan Panen gagal (puso)	
	.3	Sarana usaha pertanian :	
	1	Peralatan meliputi traktor dan sebagainya	
	2	Pembibitan	
	3	Pupuk	
	.4	Perlindungan tanaman :	
	1	Penyakit Penyakit Daun Penyakit Batang Hama Serangga Wereng Walang sangit Tungru Tikus dan sejenisnya	
	2	Pemberantasan Hama meliputi : Penyemprotan Penyiangan	
	3	Geropyokan Sparayer Pemberantasan Melalui Udara	

		4	Pestisida
	.5		Tanah pertanian pangan :
		1	Persawahan
		2	Perladangan
		3	Kebun
		4	Rumpun Ikan Laut
		5	KTA/Lahan Kritis
	.6		Pengusaha petani
	.7		Bina Usaha :
		1	Pasca Panen
		2	Pemasaran Hasil

### **522 KEHUTANAN**

	.1		Program :
		1	Hak pengusaha hutan
		2	Tata guna hutan
		3	Perpetaan hutan
		4	Tumpangsari
	.2		Produksi :
		1	Kayu
		2	Non kayu
	.3		Sarana usaha kehutanan
	.4		Penghijauan Reboisasi
	.5		Kelestarian : meliputi :
		1	Cagar alam marga satwa suaka marga satwa
		2	Berburu meliputi larangan dan ijin berburu
		3	Kebun binatang
		4	Konservasi Lahan
	.6		Penyakit/Hama
	.7		Jenis-jenis Hutanmeliputi :
		1	Hutan Hidup
		2	Hutan Wisata
		3	Hutan Produksi
		4	Hutan Lindung

### **523 PERIKANAN**

	.1		Program :
		1	Penyuluhan
		2	Teknologi
	.2		Produksi :
		1	Pelelangan
	.3		Usaha perikanan :
		1	Pembibitan
		2	Daerah penangkapan
		3	Pertambakan meliputi : Tambak Ikan Air Deras Tambak Udang
		4	Jaring Terapung
	.4		Sarana :
		1	Peralatan

		2	Kapal	
		3	Pelabuhan	
		.5	Pengusaha	
		.6	Nelayan	
<b>524</b>	<b>PETERNAKAN</b>			
	.1	Produksi :		
		1	Susu ternak rakyat	
		2	Telur	
		3	Daging	
		4	Kulit	
	.2	Sarana usaha peternakan :		
		1	Pembibitan	
		2	Kandang Ternak	
	.3	Kesehatan hewan :		
		1	Penyakit Hewan	
		2	Pos Kesehatan Hewan	
		3	Tesi Pullorum	
		4	Karantina Pemberantasan Penyakit Hewan termasuk Usaha Pencegahannya	
	.4	Perunggasan		
	.5	Pengembangan Ternak :		
		1	Inseminasi Buatan	
		2	Pembibitan/Bibit Unggul	
		3	Penyebaran Ternak	
	.6	Makanan Ternak		
	.7	Tempat Pemotongan Hewan		
	.8	Data Peternakan		
<b>525</b>	<b>PERKEBUNAN</b>			
	.1	Program		
	.2	Produksi :		
		1	Karet	
		2	Teh	
		3	Tembakau	
		4	Tebu	
		5	cengkeh	
		6	Kelapa/kopra/kelapa sawit	
		7	Kopi	
		8	Coklat	
		9	aneka tanaman	
526	-			
527	-			
528	-			
529	-			
<b>530</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>			
	.08	Undang – Undang Gangguan		
531	Industri logam			

532	Industri mesin/elektronik
533	Industri kimia/farmasi
534	Industri tekstil
535	Industri makanan/minuman
536	Aneka industri/perusahaan
537	Aneka kerajinan
538	Usaha Negara / BUMN <ul style="list-style-type: none"> <li>.1 Perjan</li> <li>.2 Perum</li> <li>.3 Persero/ PT</li> <li>.4 CV</li> </ul>
539	Perusahaan daerah/ BUMD/ BULD
<b>540</b>	<b>PERTAMBANGAN/KESAMUDERAAN</b>
541	Minyak bumi/bensin meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>.1 Pengusahaan</li> </ul>
542	Gas bumi <ul style="list-style-type: none"> <li>.1 Eksplorasi pengeboran meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Kontrak kerja</li> </ul> </li> <li>.2 Pengolahan Penyaluran Tangki, Pompa, Tanker</li> </ul>
543	Aneka Tambang : <ul style="list-style-type: none"> <li>.1 Timah</li> <li>.2 Aluminium Bouksit</li> <li>.3 Besi termasuk besi tua</li> <li>.4 Tembaga</li> <li>.5 Batu Bara</li> </ul>
544	Logam mulia : Intan emas perak
545	Logam
546	Geologi <ul style="list-style-type: none"> <li>.1 Vulkanologi               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pengawasan gunung berapi</li> </ul> </li> <li>.2 Sumur artetis Air Bawah Tanah</li> </ul>
547	Hidrologi
548	Kesamuderaan
549	Pesisir Pantai
<b>550</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>
551	Perhubungan darat meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>.1 Lalu lintas jalan raya Sungai Danau               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Keamanan lalu lintas rambu-rambu</li> </ul> </li> <li>.2 Angkutan jalan raya               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Perijinan</li> <li>2 Terminal</li> <li>3 Alat angkutan</li> </ul> </li> <li>.3 Angkutan sungai :               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Perijinan</li> <li>2 Terminal</li> <li>3 Pelabuhan</li> </ul> </li> </ul>

	.4	Angkutan danau
	1	Perijinan
	2	Terminal
	3	Pelabuhan
	.5	Feri : Perijinan Terminal Pelabuhan Perkeretaapian
	1	Perijinan
	2	Terminal
	3	Pelabuhan
	.6	Perkeretaapian
552		Perhubungan laut
	.1	Lalu Lintas Angkutan Laut Pelayanan Umum
	1	Keamanan Lalu Lintas Rambu-Rambu
	2	Pelayaran Dalam Negeri
	3	Pelayaran Luar Negeri
	.2	Perkapalan Alat Angkutan
	.3	Pelabuhan
	.4	Pengerukkan
	.5	Penjagaan Pantai
553		Perhubungan Udara
	.1	Lalu lintas udara/ Keamanan Lalu Lintas Udara
	.2	Perhubungan udara
	.3	Pelabuhan udara
	.4	Alat angkutan
554		Pos
555		Telekomunikasi meliputi
	.1	Telepon
	.2	Telegram
	.3	Telex/SSB Faximile
	.4	Satelit Internet
	.5	Stasiun bumi Parabola
556		Pariwisata dan rekreasi meliputi
	.1	Obyek kepariwisataan
	.2	Taman Mini Indonesia Indah
	.3	Perhotelan
	.4	Travel service
	.5	Tempat rekreasi
557		Meteorologi meliputi :
	.1	Ramalan Cuaca
	.2	Curah hujan
	.3	Kemarau panjang
558		-
559		-
<b>560</b>		<b>TENAGA KERJA</b>
	.1	Pengangguran
561		Upah

		1	Ganti rugi tanah kelebihan meliputi Sengketa ganti rugi tanah kelebihan
		2	Ganti rugi tanah absentee Meliputi : Sengketa ganti rugi tanah absentee
		3	Ganti rugi tanah Parti kelir Meliputi : Sengketa ganti rugi tanah partikelir
		.3	Bagi hasil
		1	Penetapan imbalan bagi hasil
		2	Pelaksanaan perjanjian bagi hasil
		3	Sengketa perjanjian bagi hasil
		.4	Gadai tanah
		1	Pendaftaran pelaksanaan gadai tanah
		2	Pelaksanaan gadai tanah
		3	Sengketa gadai tanah
		.5	Bimbingan dan penyuluhan
		.6	Pengembangan
		.7	Yayasan Dana Landreform
593	Pengurusan Hak – Hak Tanah		
	.01		Penyusunan Program dan Bimbingan teknis
	.1		Sewa tanah
			Sewa tanah untuk tanaman tertentu : tembakau tebu rosella corchourus
	.2		Hak milik
		1	Perorangan
		2	Badan Hukum
	.3		Hak Pakai
		1	Perorangan
		1	Warga Negara Indonesia
		2	Warga Negara Asing
		2	Badan Hukum
		1	Badan Hukum Indonesia
		2	Badan Hukum Asing. Kedutaan Konsulat Kantor Dagang Asing
		3	Tanah gedung-gedung negara
	.4		Guna usaha
		1	Perkebunan besar
		2	Perkebunan rakyat
		3	Peternakan
		4	Perikanan
		5	Kehutanan
	.5		Hak Guna Bangunan
		1	Perorangan
		2	Badan Hukum
		3	P3MB (Panitia pelaksana penguasaan milik Belanda)
		4	Badan hukum asing – PRK No. 5/65
		5	Pemulihan hak (PenPres 4/1960)
	.6		Hak pengelolaan
		1	PN. Perumnas Bonded ware house Industrial estate Real estate

		2	Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
	.7		Sengketa Tanah
		1	Peradilan Perkara Tanah
	.8		Pencabutan dan pembebasan tanah
		1	Pencabutan hak Pembebasan tanah Ganti rugi tanah
594	Pendaftaran tanah		
	.1		Pengukuran/pemetaan
		1	Fotogrametri
		2	Terristik
		3	Triangulasi
		4	Peralatan
	.2		Dana pengukuran
	.3		Sertifikat
	.4		Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)
595	Lahan Transmigrasi		
	.1		Tata guna tanah
	.2		Landform
	.3		Pengurusan hak-hak tanah
	.4		Pendaftaran Tanah
596	-		
597	-		
598	-		
599	-		
<b>600</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN</b>		
601	Tata bangunan konstruksi industri konstruksi		
602	Kontraktor pemborong		
	.1		Tender
	.2		Penunjukkan
	.3		Prakualifikasi
		1	Daftar Rekanan Mampu (DRM)
		2	Tanda Daftar Rekanan
603	Arsitektur		
604	Bahan bangunan		
	.1		Tanah dan batu seperti : Batu belah steen slag split dsb Pasir koral lempung kapur marmer
	.2		Aspal Aspal buatan aspal alam (butas)
	.3		Besi dan logam lainnya
		1	Besi beton
		2	Besi profil (konstruksi)
		3	Paku
		4	Aluminium profil
	.4		Bahan-bahan pelindung dan pengawet (Cat tech oil pengawet kayu)
	.5		Semen
	.6		Kayu seperti : balok papan dolken plywood gabus dsb
	.7		Bahan penutup atap(Genteng asbes gelombang)

	.8	Alat- alat penggantung dan pengunci
	.9	Bahan - bahan bangunan lainnya
605	Instalasi	
	.1	Instalasi bangunan
	.2	Instalasi listrik
	.3	Instalasi air sanitasi
	.4	Instalasi pengatur udara
	.5	Instalasi akustik
	.6	Instalasi cahaya/penerangan
606	Konstruksi pencegahan	
	.1	Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
	.2	Konstruksi Pencegahan Terhadap Gempa
	.3	Konstruksi Pencegahan Terhadap Angin/Udara/Panas
	.4	Konstruksi Pencegahan Terhadap Kegaduhan
	.5	Konstruksi Pencegahan Terhadap Gas/Eksplosif
	.6	Konstruksi Pencegahan Terhadap Serangga
	.7	Konstruksi Pencegahan Terhadap Radiasi Atom
607	-	
608	-	
609	-	
<b>610</b>	<b>PENGAIRAN</b>	
611	Irigasi	
	.1	Bangunan Waduk
	1	Bendungan
	2	Tanggul
	3	Pelimpah banjir
	4	Menara pengambilan
	.2	Bangunan pengambilan
	1	Bendungan
	2	Bendungan Dengan Pintu Bilas
	3	Bendungan Dengan Pompa
	4	Pengambilan Bebas
	5	Pengambilan Bebas Dengan Pompa
	6	Sumur Dengan Pompa
	7	Kantung Lumpur
	8	Slit Ekstraktor
	9	Escape channel
	.3	Bangunan Pembawa
	1	Saluran
	1	Saluran Induk
	2	Saluran Sekunder
	3	Suplesi
	4	Tersier
	5	Saluran Kquarter
	6	Saluran Pasangan
	7	Saluran Tertutup/Terowongan)
	2	Bangunan

			1	Bangunan Bagi
			2	Bangunan Bagi dan Sadap
			3	Bangunan Sadap
			4	Bangunan Check
			5	Bangunan Terjun
		3		Box Tersier
		4		Got Miring
		5		Talang
		6		Syphon
		7		Gorong-gorong
		8		Pelimpah Samping
	.4			Bangunan Pembuang
		1		Saluran
			1	Saluran Pembuang Induk
			2	Saluran Pembuang Sekunder
			3	Saluran Pembuang Tersier
		2		Bangunan
			1	Bangunan Outlet
			2	Bangunan Terjun
			3	Bangunan Penahan Banjir
			3	Gorong- Gorong Pembuang
			4	Talang Pembuang
			5	Syphon Pembuang
	.5			Bangunan Lainnya
		1		Jalan
			1	Jalan Inspeksi
			2	Jalan Logistik Waduk Lapangan
		2		Jembatan
			1	Jembatan Inspeksi
			2	Jembatan Hewan
		3		Tangga Cuci
			4	Kubangan Kerbau
			5	Waduk Lapangan
			6	Bangunan Penunjang
			7	Jaringan Telepon
			8	Stasiun Agro
612				Folder
	.1			Tanggul keliling
		1		Tanggul
		2		Bangunan Penutup Sungai
		3		Jembatan
	.2			Bangunan Pembawa
		1		Saluran
			1	Saluran Muka
			2	Saluran Pembawa Induk
			3	Saluran Pembawa Sekunder

		2	Stasiun pengukur air
		3	Stasiun pengukur cuaca
		4	Stasiun pos penjagaan
615	Pengamanan pantai meliputi :		
	.1 Tanggul .2 Krib .3 Bangunan lainnya		
616	Air Tanah		
	.1 Stasiun pompa .2 Bangunan pembawa .3 Bangunan pembuang .4 Bangunan lainnya		
618	-		
619	-		
<b>620</b>	<b>JALAN</b>		
621	Jalan Kota		
	.1 Daerah penguasaan 1 Tanah 2 Tanaman 3 Bangunan		
	.2 Bangunan sementara 1 Jalan sementara 2 Jembatan sementara 3 Kantor proyek 4 Gudang proyek 5 Barak kerja 6 Laboratorium lapangan 7 Rumah		
	.3 Badan jalan 1 Pekerjaan tanah (Earth Work) 2 Stabilisasi		
	.4 Perkerasan 1 Lapis pondasi bawah 2 Lapis pondasi 3 Lapis Permukaan		
	.5 Drainage 1 Parit tanah 2 Gorong-gorong(Culvert)		
	.6 Buku trotuir 1 Tanah 2 Perkerasan 3 Pasangan		
	.7 Median 1 Tanah 2 Tanaman 3 Perkerasan		

		4	Pasangan
	.8	Daerah samping	
		1	Tanaman
		2	Pagar
	.9	Bangunan pelengkap dan pengamanan	
		1	Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
		2	Lampu penerangan
		3	Lampu pengatur lalu lintas
		4	Patok-patok KM
		5	Patok-patok ROW (Sempadan)
		6	Rel pengamanan
		7	Pagar
		8	Turap penahan
		9	Bronjong
622	Jalan luar kota		
	.1	Daerah penguasaan	
		1	Tanah
		2	Tanaman
		3	Bangunan
	.2	Bangunan sementara	
		1	Jalan sementara
		2	Jembatan sementara
		3	Kantor proyek
		4	Gudang proyek
		5	Barak Kerja
		6	Laboratorium Lapangan
		7	Rumah
	.3	Badan jalan	
		1	Pekerjaan tanah ( <i>Earth Work</i> )
		2	Stabilisasi
	.4	Perkerasan	
		1	Lapis pondasi bawah
		2	Lapis pondasi
		3	Lapis Permukaan
	.5	Drainage	
		1	Parit
		2	Gorong-gorong ( <i>Culvert</i> )
		3	Subdrainage
	.6	Trotoar	
		1	Tanah
		2	Perkerasan
	.7	Median	
		1	Tanah
		2	Tanaman
		3	Perkerasan
		4	Pasangan

	.8	Daerah samping
	1	Tanaman
	2	Pagar
	.9	Bangunan pelengkap dan pengamanan
	1	Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
	2	Lampu penerangan
	3	Lampu pengatur lalu lintas
	4	Patok-patok KM
	5	Patok-patok ROW (Sempadan)
	6	Rel pengamanan
	7	Pagar
	8	Turap penahan
	9	Bronjong
623	-	
624	-	
625	-	
<b>630</b>	<b>JEMBATAN</b>	
631	Jembatan Pada Jalan Kota	
	.1	Daerah penguasaan
	1	Tanah
	2	Tanaman
	3	Bangunan
	.2	Bangunan sementara :
	1	Jalan sementara
	2	Jembatan sementara
	3	Kantor proyek
	4	Gudang proyek
	5	Barak kerja
	6	Laboratorium lapangan
	7	Rumah
	.3	Pekerjaan tanah ( <i>Earth Work</i> ) :
	1	Galian tanah
	2	Timbunan tanah
	.4	Pondasi
	1	Pondasi Kepala Jalan
	2	Pondasi Pilar
	3	Pondasi Angker
	.5	Bangunan Bawah
	1	Kepala Jembatan
	2	Pilar
	3	Piloon
	4	Landasan
	.6	Bangunan Atas
	1	Gelagar
	2	Lantai
	3	Perkerasan

		4	Jalan orang/trotoar
		5	Sandaran
		6	Talang air
	.7	Bangunan Pengaman :	
		1	Turap penahan
		2	Bronjong
		3	Kist dam
		4	Korepure
		5	Krib
	.8	Bangunan pelengkap	
		1	Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
		2	Lampu penerangan
		3	Lampu pengatur lalu lintas
		4	Patok-patok Pengaman
		5	Patok-patok ROW (Sempadan)
	.9	Oprit	
		1	Badan
		2	Perkerasan
		3	Drainage
		4	Baku
		5	Median
632	Jembatan Pada Jalan Luar Kota		
	.1	Daerah penguasaan	
		1	Tanah
		2	Tanaman
		3	Bangunan
	.2	Bangunan sementara	
		1	Jalan sementara
		2	Jembatan sementara
		3	Kantor proyek
		4	Gudang proyek
		5	Barak kerja
		6	Laboratorium lapangan
		7	Rumah
	.3	Pekerjaan tanah (Earth Work) : Galian tanah Timbunan tanah	
		1	Galian tanah
		2	Timbunan tanah
	.4	Pondasi	
		1	Pondasi Kepala Jalan
		2	Pondasi Pilar
		3	Pondasi Angker
	.5	Bangunan bawah	
		1	Kepala Jembatan
		2	Pilar
		3	Piloon
		4	Landasan

	.6	Bangunan atas
	1	Gelagar
	2	Lantai
	3	Perkerasan
	4	Jalan orang/trotoar
	5	Sandaran
	6	Talang air
	.7	Bangunan Pengaman
	1	Turap/ Penahan
	2	Bronjong
	3	Kist Dam
	4	Corepure
	5	Krib
	.8	Bangunan Pelengkap
	1	Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
	2	Lampu penerangan
	3	Lampu pengatur lalu lintas
	4	Patok-patok Pengaman
	5	Patok-patok ROW (Sempadan)
	.9	Oprit
	1	Badan
	2	Perkerasan
	3	Drainage
	4	Baku
	5	Median
633	-	
634	-	
635	-	
<b>640</b>	<b>BANGUNAN</b>	
641	Gedung pemerintah	
	.1	Bangunan Pemerintahan
	.2	Gedung Pengadilan
	.3	Rumah Pejabat Negara
	.4	Gedung DPR
	.5	Gedung Balaikota
	.6	Penjara
	.7	Perkantoran
642	Bangunan pendidikan	
	.1	Sekolah Menengah
643	Bangunan rekreasi	
	.1	Bangunan olah raga
	.2	Gedung Kesenian
	.3	Gedung pemancar
644	Bangunan perdagangan	
	.1	Pusat Perbelanjaan
	.2	Gedung Perdagangan

	.3	Bank
	.4	Perkantoran
645	Bangunan pelayanan umum	
	.1	Mandi cuci kakus (MCK) umum
	.2	Gedung Parkir
	.3	Rumah Sakit
	.4	Gedung Telkom
	.5	Terminal Angkutan Udara
	.6	Terminal angkutan air
646	Bangunan peninggalan sejarah	
647	Bangunan industry	
648	Bangunan Tempat Tinggal	
649	Elemen bangunan	
	.1	Pondasi
		1 Di atas tiang
	.2	Dinding
		1 Penahan beban
		2 Tidak menahan beban Atap
	.3	Lantai atau langit-langit
		1 Suspended
		2 Solit
	.4	Pintu atau jendela
		1 Pintu harmonic
		2 Pintu biasa
		3 Pintu sorong
		4 Jendela kayu
		5 Jendela sorong
		6 Jendela vertical
<b>650</b>	<b>TATAKOTA</b>	
651	Daerah Perdagangan/Pelabuhan	
	.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
	.2	Daerah Perkotaan
652	Daerah Pemerintahan	
653	Daerah Perumahan ( <i>site &amp; service</i> )	
	.1	Kepadatan Rendah (Low density)
	.2	Kepadatan Tinggi (High density)
654	Daerah Industri	
	.1	Industri Berat
	.2	Industri Ringan
	.3	Industri Rumah (home industry)
655	Daerah rekreasi : Public gardens Sport and playing fields Open space	
656	Transportasi (tata letak) : Jaringan jalan Penerangan jalan Jaringan kereta api Jaringan sungai	
657	-	
658	Kesehatan Lingkungan	
659	-	

660	<b>TATA LINGKUNGAN</b>	
	.1	Persampahan
	.2	Kebersihan Lingkungan
	.3	Pencemaran
	1	Pencemaran Air
	2	Pencemaran Udara
661	Daerah hutan	
662	Daerah pertanian/perkebunan	
663	Daerah pemukiman	
664	Pusat pertumbuhan	
665	Transportasi Jaringan jalan jaringan kereta api jaringan sungai	
666	-	
667	-	
668	-	
669	-	
<b>670</b>	<b>KETENAGAAN</b>	
671	Listrik	
672	Tenaga air	
673	Tenaga minyak	
674	Tenaga gas	
675	Tenaga matahari	
676	Tenaga nuklir	
677	Tenaga panas bumi	
678	Tenaga uap	
679	Tenaga lainnya	
<b>680</b>	<b>PERALATAN</b>	
681	-	
682	-	
683	-	
<b>690</b>	<b>AIR MINUM</b>	
691	Intake	
	.1	Broncaptering
	.2	Sumur
	.3	Bendungan
	.4	Saringan (screen)
	.5	Pintu Air
	.6	Saluran Pembawa
	.7	Alat Ukur
	.8	Perpompaan
692	Transmisi Air Baku	
	.1	Perpipaan
	.2	Katup Udara (air Relief)
	.3	Katup Penguras (Blow Off)
	.4	Bak Pelepas Tekanan
	.5	Jembatan Pipa

	.6	Syphon
693	Instansi Pengelolaan	
	.1	Bangunan Ukur
	.2	Bangunan Aerasi
	.3	Bangunan Pengendapan
	.4	Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
	.5	Bangunan Pengaduk
	.6	Bangunan Saringan
	.7	Perpompaan
	.8	Clear Hell
694	Distribusi	
	.1	Reservoir Menara Bawah Tanah
	1	Menara
	2	reservoir di Bawah Tanah
	.2	Perpipaan
	.3	Perpompaan
	.4	Jembatan Pipa
	.5	Syphon
	.6	Hydran
	1	Hydran Umum
	2	Hydran Kebakaran
	.7	Katup
	1	Katup Udara (Air Relief)
	2	Katup Pelepas (Blow Off)
	.8	Bak Pelepas Tekanan
695	-	
696	-	
697	-	
698	-	
699	-	
<b>700</b>	<b>PENGAWASAN</b>	
701	Bidang urusan dalam	
702	Bidang peralatan	
703	Bidang Kekayaan Daerah	
704	Bidang Perpustakaan/ Dokumentasi/ Kearsipan Sandi	
705	Bidang Perencanaan	
706	Bidang organisasi/ketatalaksanaan	
707	Bidang penelitian	
708	Bidang Konferensi	
709	Bidang Perjalanan Dinas	
<b>710</b>	<b>BIDANG PEMERINTAHAN</b>	
712	Bidang Pemerintahan Provinsi	
716	Bidang DPRD Provinsi	
<b>720</b>	<b>BIDANG POLITIK</b>	
721	Bidang Kepartaian	

722	Bidang Organisasi Kemasyarakatan
723	Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional
724	Bidang Organisasi Pemuda
725	Bidang Organisasi Buruh Tani dan Nelayan
726	Bidang Organisasi Wanita
727	Bidang Pemilihan Umum
728	-
729	-
<b>730</b>	<b>BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN</b>
731	Bidang Pertahanan
732	Bidang Kemiliteran
733	Bidang Perlindungan Masyarakat
734	Bidang Keamanan
735	Bidang Kejahatan
736	Bidang Bencana
737	Bidang Kecelakaan
738	-
739	-
<b>740</b>	<b>BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
741	Bidang Pembangunan Desa
742	Bidang Pendidikan
743	Bidang Kebudayaan
744	Bidang Kesehatan
745	Bidang Agama
746	Bidang Sosial
747	Bidang Kependudukan
748	Bidang Media Massa
749	-
<b>750</b>	<b>BIDANG PEREKONOMIAN</b>
751	Bidang Perdagangan
752	Bidang Pertanian
753	Bidang Perindustrian
754	Bidang Pertambangan/ Kesamudraan
755	Bidang Perhubungan
756	Bidang Tenaga Kerja
757	Bidang Permodalan
758	Bidang Perbankan/ Moneter
759	Bidang Agraria
<b>760</b>	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>
761	Bidang Pengairan
762	Bidang Jalan
763	Bidang Jembatan
764	Bidang Bangunan
765	Bidang Tata Kota
766	Bidang Lingkungan
767	Bidang Ketenagaan
768	Bidang Peralatan

769	Bidang Air Minum	
770	-	
771	-	
772	-	
773	-	
774	-	
775	-	
776	-	
777	-	
778	-	
779	-	
<b>780</b>	<b>BIDANG KEPEGAWAIAN</b>	
781	Bidang Pengadaan Pegawai	
782	Bidang Mutasi Pegawai	
783	Bidang Kedudukan Pegawai	
784	Bidang Kesejahteraan Pegawai	
785	Bidang Cuti	
786	Bidang Penilaian	
787	Bidang Tata Usaha Kepegawaian	
788	Bidang Pemberhentian Pegawai	
789	Bidang Pendidikan Pegawai	
<b>790</b>	<b>BIDANG KEUANGAN</b>	
791	Bidang Anggaran	
792	Bidang Otorisasi	
793	Bidang Verifikasi	
794	Bidang Pembukuan	
795	Bidang Pembendaharaan	
796	Bidang Pembina Kebendaharaan	
797	Bidang Pendapatan	
798	-	
799	Bidang Bendaharaan	
<b>800</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b> Kebijaksanaan Kepegawaian	
	.1	Perencanaan
	.2	Penelitian
	.04 3	Pengaduan
	.05	Team
	.06	Statistik
	.07	Peraturan perundang- undangan
<b>810</b>	<b>PENGADAAN</b> <b>Meliputi : Lamaran Pengujian Kesehatan dan Pengangkatan Calon Pegawai</b>	
811	Lamaran	
	.1	Testing
	.2	Screening
	.3	Panggilan

812	Pengujian kesehatan	
813	Pengangkatan calon pegawai	
	.1	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan I
	.2	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
	.3	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
	.4	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
	.5	Pengangkatan Calon Guru Inpres
814	Pengangkatan tenaga lepas	
	.1	Pengangkatan Tenaga Bulanan/ Tenaga Kontrak
	.2	Pengangkatan Tenaga Harian
	.3	Pengangkatan Tenaga Pensiunan
815	Pengangkatan tenaga asing	
816	-	
817	-	
818	-	
819	-	
<b>820</b>	<b>MUTASI</b> <b>Meliputi : Pengangkatan Kenaikan Gaji Berkala Kenaikan Pangkat Pemindahan Pelimpahan Datasing Tugas Belajar Dan Wajib Militer</b>	
821	Pengangkatan	
	.1	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri (tetap)
		1 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan I
		2 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri golongan II
		3 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan III
		4 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan IV
		5 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang Cuti di Luar Tanggungan Negara
		6 Pengangkatan dalam jabatan pembebasan dari jabatan.
	.2	Berita Acara serah terima jabatan
822	Kenaikan Gaji Berkala	
	.1	Pegawai Golongan I
	.2	Pegawai golongan II
	.3	Pegawai golongan III
	.4	Pegawai golongan IV
823	Kenaikan pangkat/pengangkatan	
	.1	Pegawai golongan I
	.2	Pegawai golongan II
	.3	Pegawai golongan III
	.4	Pegawai golongan IV
824	Pemindahan/pelimpahan/perbantuan	
	.1	Pegawai golongan I
	.2	Pegawai golongan II
	.3	Pegawai golongan III
	.4	Pegawai golongan IV
	.5	Lolos butuh
	.6	Kurikulum dan Silabi
	.7	Proposal (TOR)

825	Detasering dan penempatan kembali
826	Penunjukan tugas belajar
	.1 Dalam Negeri Luar Negeri
	.2 Tunjangan belajar
	.3 Penempatan kembali
827	Wajib militer
828	Mutasi dengan instansi lain
829	-
<b>830</b>	<b>KEDUDUKAN</b> <b>Meliputi : Perhitungan Masa Kerja Penyesuaian Pangkat/ Gaji Penghargaan Ijasah dan Jenjang Pangkat</b>
831	Perhitungan masa kerja
832	Penyesuaian pangkat/gaji
	.1 Pegawai Golongan I
	.2 Pegawai Golongan II
	.3 Pegawai golongan III
	.4 Pegawai golongan IV
833	Penghargaan ijasah/ Penyesuaian
834	Jenjang pangkat/ Eselonering
835	-
836	-
837	-
838	-
839	-
<b>840</b>	<b>KESEJAHTERAAN PEGAWAI</b> <b>Meliputi : Tunjangan Dana Perawatan Kesehatan Koperasi Distribusi Perumahan/ Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi dan Dispensasi.</b>
841	Tunjangan
	.1 Jabatan
	.2 Kehormatan
	.3 Kematian/Uang Duka
	.4 Tunjangan hari raya
	.5 Perjalanan dinas tetap/cuti/pindah
	.6 Keluarga
	.7 Sandang Pangan Papan( Bapertarum )
842	Dana meliputi :
	.1 Taspen
	.2 Kesehatan
	.3 Asuransi
843	Perawatan kesehatan
	.1 Perawatan Poliklinik
	.2 Perawatan Dokter
	.3 Obat-obatan
	.4 Keluarga Berencana
844	Koperasi/distribusi
	.1 Distribusi Pangan
	.2 Distribusi Sandang

h

	.3	Distribusi Papan
845	Perumahan/tanah meliputi :	
	.1	Perumahan pegawai
	.2	Tanah Kapling
	.3	Losmen/Hotel
846	Bantuan sosial meliputi	
	.1	Bantuan Kebakaran
	.2	Bantuan Kebanjiran
847	Rekreasi	
848	Dispensasi	
849	-	
<b>850</b>	<b>CUTI</b> <b>Meliputi cuti tahunan cuti besar cuti sakit cuti hamil cuti naik haji cuti diluar tanggungan Negara dan cuti alasan lain</b>	
851	Cuti tahunan	
852	Cuti besar	
853	Cuti sakit	
854	Cuti hamil	
855	Cuti naik haji/ Umroh	
856	Cuti diluar tanggungan Negara	
857	Cuti alasan lain/ Alasan Penting	
858	-	
859	-	
<b>860</b>	<b>PENILAIAN</b> <b>Meliputi : Penghargaan Hukuman Konduite Ujian Dinas Penilaian Kekayaan Pribadi dan Rehabilitasi</b>	
861	Penghargaan Arsip atau naskah yang berhubungan dengan penghargaan meliputi :	
	.1	Bintang/satyalencana
	.2	Kenaikan pangkat anumerta
	.3	Kenaikan gaji istimewa
	.4	Hadiah berupa uang
	.5	Pegawai teladan.
862	Hukuman Arsip atau naskah yang berhubungan dengan hukuman meliputi:	
	.1	Teguran/Peringatan
	.2	Penundaan Kenaikan Gaji
	.3	Penurunan Pangkat
	.4	Pemindahan Catatan : Pemberhentian untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat Lihat 887 dan 888
863	Konduite DP3 Disiplin Pegawai	
864	Ujian Dinas	
	.1	Tingkat I
	.2	Tingkat II
	.3	Tingkat III

865	Penilaian kehidupan pegawai negeri Meliputi petunjuk pelaksanaan hidup sederhana penilaian kekayaan pribadi (LP2P)	
866	Rehabilitasi/ Pengaktifan Kembali	
867	-	
868	-	
869	-	
<b>870</b>	<b>TATA USAHA KEPEGAWAIAN</b> <b>Meliputi formasi bezzeting registrasi daftar riwayat hak penggajian sumpah/janji dan Korps pegawai</b>	
871	Formasi	
872	Bezzeting/ Daftar Urut Kepegawaian	
873	Registrasi meliputi :	
	.1	NIP
	.2	KARPEG
	.3	Legitimasi/Tanda Pengenal
	.4	Daftar keluarga Perkawinan Perceraian Karis Karsu
874	Daftar riwayat pekerjaan	
	.1	Tanggal lahir
	.2	Penggantian nama
	.3	Izin Kepartaian organisasi
875	Kewenangan mutasi kepegawaian	
	.1	Pelimpahan Wewenang
	.2	Specimen Tanda Tangan
876	Penggajian	
	.1	SKPP
877	Sumpah/Janji pegawai	
878	Korps pegawai	
879	-	
<b>880</b>	<b>PEMBERHENTIAN PEGAWAI</b> <b>Meliputi atas pemberhentian permintaan sendiri dengan hak pensiun karena meninggal dunia alasan lain dengan diberi uang pesongan uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat</b>	
881	Permintaan sendiri	
882	Dengan hak pensiun	
	.1	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan I
	.2	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan II
	.3	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan III
	.4	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Golongan IV
	.5	Pensiun Janda/Duda
	.6	Pensiun Yatim Piatu
	.7	Uang Muka Pension
883	Karena meninggal	

	.1	Karena Meninggal Dalam Tugas
884	Alasan lain	
885	Uang pesangon	
886	Uang tunggu	
887	Untuk sementara waktu	
888	Tidak dengan hormat	
889	-	
<b>890</b>	<b>PENDIDIKAN PEGAWAI</b>	
	<b>Meliputi : Perencanaan Pendidikan Regular Pendidikan Non Regular Pendidikan Ke Luar Negeri Metode Tenaga Pengajar Administrasi Pendidikan Fasilitas dan Sarana Pendidikan.</b>	
891	Perencanaan meliputi :	
	.1	Program
	.2	Kurikulum dan Silabi
	.3	Proposal (TOR)
892	Pendidikan reguler/ Kader meliputi :	
	.1	IPDN/APDN
	.2	Kursus-Kursus Reguler
893	Pendidikan dan Pelatihan/non reguler meliputi : LEMHANAS Pendidikan dan Pelatihan Struktural SPATI SPAMEN SPAMA ADUMLA ADUM Kursus-kursus / Penataran Diklat Tehnik Fungsional dan Managemen Pemerintahan Diklat Lainnya	
894	Pendidikan luar negeri meliputi : Berkesinambungan/ Berkala / Bergelar Non Gelar/ Diploma	
895	Metode meliputi : Kuliah Ceramah Simposium Diskusi Raker Seminar Lokakarya Orientasi Studi Lapangan KKN Widyawisata Tanya Jawab/ Silabi/ Modul/ Kursil Penugasan Gladi	
896	Tenaga pengajar/ Widya Iswara/ Narasumber	
	.1	Moderator
897	Administrasi pendidikan meliputi :	
	.1	Tahun Pelajaran
	.2	Persyaratan Pendaftaran Testing Ujian
	.3	STTP
	.4	Penilaian Angka Kredit
	.5	Laporan Pendidikan dan Pelatihan
898	Fasilitas Belajar meliputi : Tunjangan Belajar Asrama Uang Makan Uang Transport Uang Buku Uang Ujian Uang Semester/ Uang Kuliah Uang Saku	
899	Sarana meliputi : Bantuan Sarana Belajar Bantuan Alat-alat Tulis Bantuan Sarana Belajar Lainnya.	
<b>900</b>	<b>KEUANGAN</b>	
901	Nota keuangan	
902	APBN	
903	APBD	
904	APBN-P	

905	Dana Alokasi Umum
906	Dana Alokasi Khusus
907	Dekonsentrasi ( Pelimpahan Dana dari Pusat ke Daerah )
908	-
909	-
<b>910</b>	<b>ANGGARAN</b>
911	Dokumen Anggaran Satuan Kerja (Rutin )
912	Dokumen Anggaran Satuan Kerja (Pembangunan)
913	Perubahan anggaran (Anggaran Belanja Tambahan )
914	Daftar Isian Kegiatan (DIK)
	.1 Daftar Usulan Kegiatan (DUK)
915	Daftar Isian Proyek (DIP)
	.1 Daftar Usulan Proyek (DUP)
	.2 Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)
916	Revisi Anggaran
917	-
918	-
919	-
<b>920</b>	<b>OTORISASI/ SKO</b>
921	Rutin
922	Pembangunan
923	SIAP
924	Ralat SKO
925	-
926	-
927	-
928	-
929	-
<b>930</b>	<b>VERIFIKASI</b>
931	SPM rutin
932	SPM Pembangunan
933	Penerimaan
934	SPJ Rutin
935	SPJ Pembangunan
936	Nota pemeriksaan
937	SP Pemindahan Pembukuan (SPPP)
938	-
939	-
<b>940</b>	<b>PEMBUKUAN</b>
941	Penyusunan perhitungan anggaran
942	Permintaan data anggaran
943	Laporan Fisik Pembangunan
944	
945	
946	
947	

948	
949	
<b>950</b>	<b>PERBENDAHARAAN</b>
951	Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)
952	Tuntutan Bendaharawan
953	Penghapusan Kekayaan Negara
954	Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek
955	Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan
956	Specimen Tanda Tangan
957	Surat Tagihan Piutang Ikhtisar Bulanan
958	-
959	-
<b>960</b>	<b>PEMBINAAN KEBENDAHARAAN</b>
961	Pemeriksaan Kas Dan Hasil Pemeriksaan Kas
962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
963	Laporan Keuangan Bendaharawan
964	
965	
966	
967	
968	
969	
<b>970</b>	<b>PENDAPATAN</b>
971	Perimbangan Keuangan
972	Subsidi
973	Pajak, Ipeda, IHH, IHPH
974	Retribusi
975	Bea
976	Cukai
977	Pungutan/ BNPT
978	Bantuan Presiden, Menteri dan Bantuan Lainnya
979	-
980	-
981	-
<b>990</b>	<b>BENDAHARAWAN</b>
991	SKPP/SPP
992	Teguran SPJ
993	-
994	-
995	-
996	-
997	-
998	-
999	-

Keterangan :

1. Kode klasifikasi surat dikelompokkan dalam 10 pokok masalah, diberi kode 000 s/d 900. Dari 10 pokok masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara tugas substantif (pokok) dan tugas fasilitatif (penunjang). Angka 100 s/d 900 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 000 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif yang menampung masalah-masalah di luar masalah substantif. Di samping itu juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumahtanggaan, seperti protokol urusan dalam dan masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara atau daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
2. Pokok masalah sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah sebagai berikut:  
000 umum.  
100 pemerintahan.  
200 politik.  
300 keamanan dan ketertiban.  
400 kesejahteraan.  
500 perekonomian.  
600 pekerjaan umum dan ketenagakerjaan.  
700 pengawasan.  
800 kepegawaian.  
900 keuangan.
3. Kode wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 53.

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

V

VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : TAHUN 2019  
 TANGGAL : 2019

**KODE PD/UPTD/CABANG DINAS**

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
1.	<b>BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA</b>		<b>PEMKES</b>
1	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH		PEMKES1
.1	Sub Bagian TU		PEMKES1.1
.2	Sub Bagian Pemerintahan Umum		PEMKES1.2
.3	Sub Bagian Otonomi Daerah		PEMKES1.3
2	BAGIAN PENGEMBANGAN DAERAH, PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT POLITIK		PEMKES2
.1	Sub Bagian Pejabat Daerah dan Pejabat Politik		PEMKES2.1
.2	Sub Bagian Pengembangan Daerah		PEMKES2.2
.3	Sub Bagian Kecamatan dan Kelurahan		PEMKES2.3
3	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
.1	Sub Bagian Bina Agama		PEMKES3.1
.2	Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga		PEMKES3.2
.3	Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan		PEMKES3.3
2.	<b>BIRO HUKUM</b>		<b>HK</b>
1	BAGIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN		HK1
.1	Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah		HK1.1
.2	Sub Bagian Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur		HK1.2
.3	Sub Bagian Pengkajian Peraturan Daerah dan Dokumentasi Hukum		HK1.3

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
2	BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/ KOTA		HK2
	.1	Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota Wilayah I	HK2.1
	.2	Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota Wilayah II	HK2.2
	.3	Sub Bagian Tata Usaha Biro	HK2.3
3	BAGIAN BANTUAN HUKUM		HK3
	.1	Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum	HK3.1
	.2	Sub Bagian Hak Azasi Manusia	HK3.2
	.3	Sub Bagian Penyuluhan	HK3.3
3	<b>BIRO EKONOMI DAN KERJASAMA</b>		<b>EK</b>
1	BAGIAN KERJASAMA DALAM NEGERI		EK
	.1	Sub Bagian Tata Usaha Biro	EK1.1
	.2	Sub Bagian Kerjasama Pemerintah Daerah	EK1.2
	.3	Sub Bagian Non Pemerintahan	EK1.3
2	BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI		EK2
	.1	Sub Bagian Kerjasama Lembaga Pemerintahan	EK2.1
	.2	Sub Bagian Kerjasama Lembaga Non Pemerintahan	EK2.2
3	BAGIAN EKONOMI		EK3
	.1	Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi Daerah	EK3.1
	.2	Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Energi	EK3.2
	.3	Sub Bagian Sarana Prasarana Perekonomian	EK3.3
4.	<b>BIRO PENGADAAN BARANG/ JASA</b>		<b>PBJ</b>
1	BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN LAYANAN SECARA ELEKTRONIK		PBJ1
	.1	Sub Bagian Tata Usaha Biro	PBJ1.1

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.2	Sub Bagian Pengeloaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	PBJ1.2
	.3	Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Informasi Pengadaan Barang/ Jasa	PBJ1.3
2	BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/ JASA		PBJ2
	.1	Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/ Jasa	PBJ2.1
	.2	Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa	PBJ2.2
	.3	Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi	PBJ2.3
3	BAGIAN PEMBINAAN, ADVOKASI PENGADAAN BARANG/ JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		PBJ3
	.1	Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa	PBJ3.1
	.2	Sub Bagian Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan APBD Provinsi	PBJ3.2
	.3	Sub Bagian Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan APBN	PBJ3.3
5.	<b>BIRO UMUM</b>		<b>BU</b>
1	BAGIAN TATA USAHA		BU1
	.1	Sub Bagian Tata Usaha Biro	BU1.1
	.2	Sub Tata Usaha Pimpinan	BU1.2
	.3	Sub Bagian Administrasi dan Ekspedisi	BU1.3
2	BAGIAN RUMAH TANGGA		BU2
	.1	Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan	BU2.1
	.2	Sub Bagian Perlengkapan	BU2.2
	.3	Sub Bagian Urusan Umum	BU2.3
3	BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN		BU3
	.1	Sub Bagian Verifikasi	BU3.1

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.2	Sub Bagian Belanja Pegawai	BU3.2
	.3	Sub Bagian Belanja Non Pegawai	BU3.3
6.	<b>BIRO ORGANISASI</b>		<b>BO</b>
1	BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISA JABATAN		BO1
	.1	Sub Bagian Tata Usaha Biro	BO1.1
	.2	Sub Bagian Kelembagaan	BO1.2
	.3	Sub Bagian Analisa Jabatan	BO1.3
2	BAGIAN TATALAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK		BO2
	.1	Sub Bagian Tatalaksana	BO2.1
	.2	Sub Bagian Pelayanan Publik	BO2.2
3	BAGIAN KINERJA ORGANISASI		BO3
	.1	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	BO3.1
	.2	Sub Bagian Reformasi Birokrasi	BO3.2
7.	<b>BIRO HUMAS DAN PROTOKOL</b>		<b>HP</b>
1	BAGIAN PELAYANAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN		HP1
	.1	Sub Bagian Tata Usaha Biro	HP1.1
	.2	Sub Bagian Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan	HP1.2
2	BAGIAN PERS, DOKUMENTASI, PENGELOLAAN PENDAPAT UMUM DAN PERPUSTAKAAN		HP2
	.1	Sub Bagian Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum	HP2.1
	.2	Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Penerbitan	HP2.2
	.3	Sub Bagian Perpustakaan Sekretariat Daerah	HP2.3
3	BAGIAN PROTOKOL		HP3
	.1	Sub Bagian Acara	HP3.1
	.2	Sub Bagian Tamu	HP3.2

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.3 Seksi Jaminan Sosial Keluarga		DINSOS5.3
6	UPTD...		UDINSOS1...
15.	<b>DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>		<b>TKKT</b>
1	SEKRETARIAT		TKKT1
	.1 Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi		TKKT1.1
	.2 Sub Bagian Keuangan		TKKT1.2
	.3 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		TKKT1.3
2	BIDANGKELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI		TKKT2
	.1 Seksi Kelembagaan		TKKT2.1
	.2 Seksi Pengawasan		TKKT2.2
	.3 Seksi Penilaian Kesehatan dan Pemeringkatan		TKKT2.3
3	BIDANGPEMBERDAYAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH		TKKT3
	.1 Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		TKKT3.1
	.2 Seksi Sumber Daya Manusia Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah		TKKT3.2
	.3 Seksi Pengembangan, Promosi Koperasi dan Usaha Kecil		TKKT3.3
4	BIDANGKETENAGAKERJAAN		TKKT4
	.1 Seksi Penempatan, Pembinaan Dan Pemagangan Tenaga Kerja		TKKT4.1
	.2 Seksi Pengawasan Pengupahan Dan Jaminan Sosial		TKKT4.2
	.3 Seksi Informasi Pasar Kerja Dan Perselisihan Hubungan Industrial		TKKT4.3
5	BIDANG KETRANSIMIGRASIAN		TKKT5
	.1 Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi		TKKT5.1

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.1	Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Keluarga Berencana	DINKES2.1
	.2	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	DINKES2.2
	.3	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	DINKES2.3
3	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		DINKES3
	.1	Seksi Surveilens dan Imunisasi	DINKES3.1
	.2	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	DINKES3.2
	.3	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Serta Kesehatan Jiwa	DINKES3.3
4	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN		DINKES4
	.1	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional	DINKES4.1
	.2	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	DINKES4.2
	.3	Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan	DINKES4.3
5	BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		DINKES5
	.1	Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	DINKES5.1
	.2	Seksi Pengembangan SDM Kesehatan	DINKES5.2
	.3	Seksi Legalitas Tenaga Kesehatan dan Institusi Diklat SDM Kesehatan	DINKES5.3
6	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DINKES6
	.1	Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	DINKES6.1
	.2	Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil	DINKES6.2
	.3	Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	DINKES6.3
7	UPTD.....		UDINKES1...

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
12	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN RAKYAT</b>		<b>PUPR</b>
1	SEKRETARIAT		PUPR1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	PUPR1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	PUPR1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	PUPR1.3
2	BIDANG BINA MARGA		PUPR2
	.1	Seksi Perencanaan	PUPR2.1
	.2	Seksi Pembangunan dan Laboratorium Teknik	PUPR2.2
	.3	Seksi Pemeliharaan, Peralatan dan Perbengkelan	PUPR2.3
3	BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI		PUPR3
	.1	Seksi Perencanaan	PUPR3.1
	.2	Seksi Pembangunan Irigasi	PUPR3.2
	.3	Seksi Pembangunan Sumber Daya Air	PUPR3.3
4	BIDANG OPERASI SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI		PUPR4
	.1	Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Komisi Irigasi	PUPR4.1
	.2	Seksi Operasi Irigasi dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air	PUPR4.2
	.3	Seksi Operasi Prasarana Sumber Daya Air	PUPR4.3
5	BIDANG PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH		PUPR5
	.1	Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	PUPR5.1
	.2	Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	PUPR5.2
	.3	Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang	PUPR5.3
6	BIDANG CIPTA KARYA		PUPR6

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.1	Seksi Perencanaan dan Pengendalian	PUPR6.1
	.2	Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	PUPR6.2
	.3	Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan	PUPR6.3
7	BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN		PUPR7
	.1	Seksi Perencanaan dan Pengendalian	PUPR7.1
	.2	Seksi Penyediaan Perumahan	PUPR7.2
	.3	Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PUPR7.3
8	UPTD .....		UPUPR1....
13	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>		<b>SATPOLPP</b>
1	SEKRETARIAT		SATPOLPP1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	SATPOLPP1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	SATPOLPP1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	SATPOLPP1.3
2	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		SATPOLPP2
	.1 Seksi Operasi Dan Pengendalian		SATPOLPP2.1
	.2 Seksi Hubungan Kelembagaan		SATPOLPP2.2
3	BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR		SATPOLPP3
	.1	Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan	SATPOLPP3.1
	.2	Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	SATPOLPP3.2
4	BIDANG SUMBER DAYA APARATUR		SATPOLPP4
	.1	Seksi Pelatihan Dasar Dan Teknis Fungsional	SATPOLPP4.1
	.2	Seksi Kesamaptaan	SATPOLPP4.2
5	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT		SATPOLPP5
	.1	Seksi Bina Potensi, Kewaspadaan Dan	SATPOLPP5.1

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	Mobilisasi		
	.2	Seksi Penanggulangan Kebakaran	SATPOLPP5.2
<b>14.</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>		<b>DINSOS</b>
1	SEKRETARIAT		DINSOS1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	DINSOS1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	DINSOS1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DINSOS1.3
2	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL		DINSOS2
	.1	Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Dan Sumber Dana Bantuan Sosial	DINSOS2.1
	.2	Seksi Kepahlawanan Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan Sosial	DINSOS2.2
	.3	Seksi Penyuluhan	DINSOS2.3
3	BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN		DINSOS3
	.1	Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan	DINSOS3.1
	.2	Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan	DINSOS3.2
	.3	Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Dan Perbatasan Antar Negara	DINSOS3.3
4	BIDANG REHABILITASI SOSIAL		DINSOS4
	.1	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia	DINSOS4.1
	.2	Seksi Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	DINSOS4.2
	.3	Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan Korban Migran	DINSOS4.3
5	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		DINSOS5
	.1	Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	DINSOS5.1
	.2	Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	DINSOS5.2

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.3	Sub Bagian Perjalanan	HP3.3
<b>8.</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		<b>SETWAN</b>
1	BAGIAN UMUM		SETWAN1
	.1	Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	SETWAN1.1
	.2	Sub Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam	SETWAN1.2
	.3	Sub Bagian Protokol dan Perjalanan	SETWAN1.3
2	BAGIAN PERSIDANGAN, HUMAS DAN PRODUK HUKUM DAERAH		SETWAN2
	.1	Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan Dokumentasi	SETWAN2.1
	.2	Sub Bagian Persidangan dan Alat Kelengkapan Dewan	SETWAN2.2
	.3	Sub Bagian Humas dan Publikasi	SETWAN2.3
3	BAGIAN KEUANGAN		SETWAN3
	.1	Sub Bagian Anggaran	SETWAN3.1
	.2	Sub Bagian Administrasi Keuangan	SETWAN3.2
	.3	Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi	SETWAN3.3
<b>9.</b>	<b>INSPEKTORAT</b>		<b>INSP</b>
1	SEKRETARIAT		INSP1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	INSP1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	INSP1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	INSP1.3
2	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I		INSPI
3	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II		INSPII
4	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III		INSPIII
5	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV		INSPIV
<b>10.</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>		<b>PK</b>
1	SEKRETARIAT		PK1

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.2	Seksi Pembinaan Sosial, Budaya dan Ekonomi	KTKT5.2
	.3	Seksi Penempatan, Pemindahan dan Sarana Prasarana	KTKT5.3
<b>16.</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		<b>DP3A</b>
1	SEKRETARIAT		DP3A1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	DP3A1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	DP3A1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DP3A1.3
2	BIDANG KELEMBAGAAN GENDER DAN KEMITRAAN		DP3A2
	.1	Seksi Pengarusutamaan gender	DP3A2.1
	.2	Seksi Kemitraan	DP3A2.2
3	BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA		DP3A3
	.1	Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	DP3A3.1
	.2	Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	DP3A3.2
4	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN		DP3A4
	.1	Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan, Anak dan Perdagangan Orang	DP3A4.1
	.2	Seksi Penanganan Kekerasan Perempuan, Anak Dan Perdagangan Orang	DP3A4.2
5	BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		DP3A5
	.1	Seksi Pemenuhan Hak Anak	DP3A5.1
	.2	Seksi Perlindungan Khusus Anak	DP3A5.2
<b>17.</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>		<b>DPKP</b>
1	SEKRETARIAT		DPKP1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	DPKP1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	DPKP1.2

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DPKP1.3
2	BIDANGTANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		DPKP2
	.1	Seksi Produksi Serealia	DPKP2.1
	.2	Seksi Produksi Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian	DPKP2.2
	.3	Seksi Produksi Hortikultura	DPKP2.3
3	BIDANG PERKEBUNAN		DPKP3
	.1	Seksi Produksi Tanaman Tahunan	DPKP3.1
	.2	Seksi Produksi Tanaman Semusim	DPKP3.2
	.3	Seksi Produksi tanaman Rempah dan Penyegar	DPKP3.3
4	BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN		DPKP4
	.1	Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	DPKP4.1
	.2	Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	DPKP4.2
	.3	Seksi Penyuluhan	DPKP4.3
5	BIDANGPRASARANA SARANA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN		DPKP5
	.1	Seksi Pengelolaan Lahan dan Air	DPKP5.1
	.2	Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian	DPKP5.2
	.3	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	DPKP5.3
6	UPTD...		UDPKP1
<b>18.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>		<b>DLHK</b>
1	SEKRETARIAT		DLHK1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	DLHK1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	DLHK1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DLHK1.3
2	BIDANG PENATAAN DAN PEMANFAATAN		DLHK2
	.1	Seksi Tata Lingkungan Dan Kehutanan	DLHK2.1

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.2	Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan	DLHK2.2
	.3	Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan Hutan	DLHK2.3
3	BIDANG PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN		DLHK3
	.1	Seksi Pengamanan dan Penegakan Hukum	DLHK3.1
	.2	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	DLHK3.2
	.3	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	DLHK3.3
4	BIDANG PEMBINAAN		DLHK4
	.1	Seksi Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3	DLHK4.1
	.2	Seksi Pemeliharaan Lingkungan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	DLHK4.2
	.3	Seksi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	DLHK4.3
5	BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PERHUTANAN SOSIAL		DLHK5
	.1	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	DLHK5.1
	.2	Seksi Penyuluhan	DLHK5.2
	.3	Seksi Bina Usaha Kehutanan	DLHK5.3
6	UPTD...		UDLHK1..
7	CABANG DINAS...		CLHK1..
19.	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		<b>DPMD</b>
1	SEKRETARIAT		DPMD1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	DPMD1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	DPMD1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DPMD1.3
2	BIDANGKELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT		DPMD2

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE	
	.1	Seksi penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	DPMD2.1	
	.2	Seksi Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya		
3	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT		DPMD3	
	.1	Seksi Bina kelembagaan dan pengembangan modal usaha ekonomi masyarakat	DPMD3.1	
	.2	Seksi Bina pemasaran dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	DPMD3.2	
4	BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI DESA		DPMD4	
	.1	Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	DPMD4.1	
	.2	Seksi Bina Sarana Prasarana Desa	DPMD4.2	
5	BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA		DPMD5	
	.1	Seksi Fasilitasi Penataan Dan Administrasi Desa	DPMD5.1	
	.2	Seksi Pengembangan kapasitas aparatur desa dan evaluasi perkembangan desa	DPMD5.2	
20.	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>		<b>DISHUB</b>	
1	SEKRETARIAT		DISHUB1	
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	DISHUB1.1	
	.2	Sub Bagian Keuangan	DISHUB1.2	
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DISHUB1.3	
2	BIDANG LALU LINTAS JALAN		DISHUB2	
	.1	Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan	DISHUB2.1	
	.2	Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan	DISHUB2.2	
	.3	Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DISHUB2.3	

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
3	BIDANG ANGKUTAN JALAN		DISHUB3
	.1	Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal	DISHUB3.1
	.2	Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang	DISHUB3.2
	.3	Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan	DISHUB3.3
4	BIDANG KEPELABUHANAN		DISHUB4
	.1	Seksi Pembangunan Pelabuhan	DISHUB4.1
	.2	Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan	DISHUB4.2
	.3	Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan	DISHUB4.3
5	BIDANG ANGKUTAN PELAYARAN		DISHUB5
	.1	Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat	DISHUB5.1
	.2	Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran	DISHUB5.2
	.3	Seksi Angkutan Penyeberangan	DISHUB5.3
6	UPTD...		UDISHUB1...
21	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>		<b>KOMINFO</b>
1	SEKRETARIAT		KOMINFO1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	KOMINFO1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	KOMINFO1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	KOMINFO1.3
2	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		KOMINFO2
	.1	Seksi pengelolaan Media informasi, dokumentasi, kelembagaan dan aspirasi publik	KOMINFO2.1
	.2	Seksi Pengelolaan layanan media dan sumber daya komunikasi publik	KOMINFO2.2
	.3	Seksi Pengelolaan data dan statistik sektoral	KOMINFO2.3

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
3	BIDANG PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI		KOMINFO3
	.1	Seksi Tata kelola persandian	KOMINFO3.1
	.2	Seksi Operasional pengamanan Sandi	KOMINFO3.2
	.3	Seksi Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan sandi	KOMINFO3.3
4	BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI		KOMINFO4
	.1	Seksi Tata kelola dan pengembangan infrastruktur	KOMINFO4.1
	.2	Seksi Pengawasan dan pengendalian infrastruktur	KOMINFO4.2
	.3	Seksi Pelayanan infrastruktur	KOMINFO4.3
5	BIDANGLAYANANE-GOVERNMENT		KOMINFO5
	.1	Seksi Pengembangan Aplikasi	KOMINFO5.1
	.2	Seksi PengembanganEkosistem E-government	KOMINFO5.2
	.3	Seksi Tata kelola E-government	KOMINFO5.3
22	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>		<b>DPMPTSP</b>
1	SEKRETARIAT		DPMPTSP1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	DPMPTSP1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	DPMPTSP1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DPMPTSP1.3
2	BIDANGPENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		DPMPTSP2
	.1	Seksi Data dan informasi	DPMPTSP2.1
	.2	SeksiPengembangan Potensi	DPMPTSP2.2
	3 BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL		DPMPTSP3
	.1	Seksi Pengembangan promosi penanaman modal	DPMPTSP3.1

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.2	Seksi Pelaksanaan promosi penanaman modal	DPMPTSP3.2
4	BIDANG PELAYANAN TERPADU		DPMPTSP4
	.1	Seksi Analisis perijinan dan non perijinan	DPMPTSP4.1
	.2	Seksi Pengkajian perijinan dan non perijinan	DPMPTSP4.2
	.3	Seksi Pelayanan perijinan dan non perijinan	DPMPTSP4.3
5	BIDANG PENGENDALIAN		DPMPTSP5
	.1	Seksi Pemantauan dan pengawasan	DPMPTSP5.1
	.2	Seksi Pelayanan Pengaduan	DPMPTSP5.2
6	UPTD...		UDPMPTSP1..
23	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>		<b>PO</b>
1	SEKRETARIAT		PO1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	PO1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	PO1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	PO1.3
2	BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA		PO2
	.1	Seksi Peningkatan Tenaga, Sumber Daya, Iptek dan Imtaq Pemuda	PO2.1
	.2	Seksi Peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda	PO2.2
	.3	Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda	PO2.3
3	BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA		PO3
	.1	Seksi Kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda	PO3.1
	.2	Seksi Organisasi kepemudaan dan kepanduan	PO3.2
	.3	Seksi Infrastruktur dan kewirausahaan pemuda	PO3.3
4	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA		PO4
	.1	Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga	PO4.1

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.2	Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	PO4.2
	.3	Seksi Pembinaan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	PO4.3
5	BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA		PO5
	.1	Seksi Pembibitan, iptek Dan Tenaga Keolahragaan	PO5.1
	.2	Seksi Promosi olahraga Dan Olahraga Prestasi	PO5.2
	.3	Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga	PO5.3
6	UPTD...		UPO1...
24.	<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>		<b>ARPUS</b>
1	SEKRETARIAT		ARPUS1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	ARPUS1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	ARPUS1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	ARPUS1.3
2	BIDANG PENGELOLAAN ARSIP		ARPUS2
	.1	Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis	ARPUS2.1
	.2	Seksi Pengelolaan Arsip Statis	ARPUS2.2
	.3	Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip	ARPUS2.3
3	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN		ARPUS3
	.1	Seksi Pembinaan Karsipan	ARPUS3.1
	.2	Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Karsipan	ARPUS3.2
	.3	Seksi Pengawasan Karsipan	ARPUS3.3
4	BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA		ARPUS4
	.1	Seksi Deposit	ARPUS4.1
	.2	Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka	ARPUS4.2
	.3	Seksi Preservasi dan Alih Media Bahan Pustaka	ARPUS4.3

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
5	BIDANGLAYANAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		ARPUS5
	.1 Seksi Layanan Perpustakaan		ARPUS5.1
	.2 Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca		ARPUS5.2
	.3 Seksi Kerjasama dan Ekstensi Perpustakaan		ARPUS5.3
25.	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		<b>DKP</b>
1	SEKRETARIAT		DKP1
	.1 Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi		DKP1.1
	.2 Sub Bagian Keuangan		DKP1.2
	.3 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		DKP1.3
2	BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN PERIKANAN BUDIDAYA		DKP2
3	BIDANG PERIKANAN TANGKAP		DKP3
4	BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		DKP4
5	BIDANGPENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN		DKP5
6	UPTD...		UDKP1...
7	CABANG DINAS...		CDKP1...
26.	<b>DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>		<b>PAREKRAF</b>
1	SEKRETARIAT		PAREKRAF1
	.1 Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi		PAREKRAF1.1
	.2 Sub Bagian Keuangan		PAREKRAF1.2
	.3 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		PAREKRAF1.3
2	BIDANG DESTINASI PARIWISATA		PAREKRAF2
	.1 Seksi Sarana Prasarana		PAREKRAF2.1
	.2 SeksipengembanganAtraksi Wisata Alam		PAREKRAF2.2
	.3 Seksi Pengembangan Wisata Budaya dan		PAREKRAF2.3

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	Buatan		
3	BIDANG INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		PAREKRAF3
	.1	Seksi Industri Pariwisata	PAREKRAF3.1
	.2	Seksi Usaha Ekonomi Kreatif	PAREKRAF3.2
	.3	Seksi Jaringan Pemasaran	PAREKRAF3.3
4	BIDANG PEMASARAN PARIWISATA		PAREKRAF4
	.1	Seksi Promosi Pariwisata	PAREKRAF4.1
	.2	Seksi Analisa Pasar Pariwisata	PAREKRAF4.2
	.3	Seksi Informasi Pemasaran Pariwisata	PAREKRAF4.3
5	BIDANG KELEMBAGAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		PAREKRAF5
	.1	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata	PAREKRAF5.1
	.2	Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata	PAREKRAF5.2
	.3	Seksi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	PAREKRAF5.3
6	UPTD...		UPAREKRAF1..
27.	<b>DINAS PETERNAKAN</b>		<b>DISNAK</b>
1	SEKRETARIAT		DISNAK1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	DISNAK1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	DISNAK1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	DISNAK1.3
2	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PETERNAKAN		DISNAK2
	.1	Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan	DISNAK2.1
	.2	Seksi Penerapan Teknologi Peternakan	DISNAK2.2
	.3	Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Peternakan	DISNAK2.3
3	BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK		DISNAK3
	.1	Seksi Ternak Ruminansia	DISNAK3.1

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.2	Seksi Ternak Non Ruminansia, Unggas dan Aneka Ternak	DISNAK3.2
	.3	Seksi Pakan Ternak	DISNAK3.3
4	BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		DISNAK4
	.1	Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan	DISNAK4.1
	.2	Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	DISNAK4.2
	.3	Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner	DISNAK4.3
5	BIDANGAGRIBISNIS DAN KELEMBAGAAN PETERNAKAN		DISNAK5
	.1	Seksi Investasi dan Kelembagaan Usaha Peternakan	DISNAK5.1
	.2	Seksi Pelayanan Usaha Peternakan dan Kemitraan	DISNAK5.2
	.3	Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	DISNAK5.3
6	UPTD...		UDISNAK1...
28.	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>		<b>PERINDAG</b>
1	SEKRETARIAT		PERINDAG1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	PERINDAG1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	PERINDAG1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	PERINDAG1.3
2	BIDANGPEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI		PERINDAG2
	.1	Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam	PERINDAG2.1
	.2	Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi	PERINDAG2.2
	.3	Seksi Pengawasan dan pengendalian	PERINDAG2.3

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH			KODE		
3	BIDANG SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI		PERINDAG3			
	.1	Seksi Pembangunan Industri Kecildan Menengah		PERINDAG3.1		
	.2	Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri		PERINDAG3.2		
	.3	Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri		PERINDAG3.3		
4	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN			PERINDAG4		
	.1	Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri		PERINDAG4.1		
	.2	Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri		PERINDAG4.2		
	.3	Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3dn)		PERINDAG4.3		
5	BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA			PERINDAG5		
	.1	Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa		PERINDAG5.1		
	.2	Seksi Tertib Niaga		PERINDAG5.2		
	.3	Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen		PERINDAG5.3		
6	UPTD...			UPERINDAG1..		
29.	<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>			<b>ESDM</b>		
1	SEKRETARIAT			ESDM1		
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi		ESDM1.1		
	.2	Sub Bagian Keuangan		ESDM1.2		
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		ESDM1.3		
2	BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH			ESDM2		
3	BIDANG MINERAL DAN BATUBARA			ESDM3		
4	BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN			ESDM4		
5	BIDANG KETENAGALISTRIKAN			ESDM5		

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
6	UPTD...		UESDM1...
7	CABANG DINAS...		CESDM1...
<b>30.</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		<b>BP4D</b>
1	SEKRETARIAT		BP4D1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	BP4D1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	BP4D1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	BP4D1.3
2	BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA		BP4D2
	.1	Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya	BP4D2.1
	.2	Sub Bidang Pemerintahan dan Politik	BP4D2.2
	.3	Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	BP4D2.3
3	BIDANG EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH		BP4D3
	.1	Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	BP4D3.1
	.2	Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam	BP4D3.2
	.3	Sub Bidang Pariwisata, Keuangan dan Jasa	BP4D3.3
4	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI		BP4D4
	.1	Sub Bidang Perencanaan, Pendanaan, Data dan Informasi	BP4D4.1
	.2	Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Provinsi dan Pusat	BP4D4.2
	.3	Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Kabupaten/Kota dan Lembaga Internasional	BP4D4.3
5	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		BP4D5
	.1	Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Utama	BP4D5.1
	.2	Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	BP4D5.2

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	Pendukung		
	.3 Sub Bidang Inovasi		
<b>31</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH</b>		<b>BPAD</b>
1	SEKRETARIAT		BPAD1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	BPAD1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	BPAD1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	BPAD1.3
2	BIDANG PENDAPATAN I		BPAD2
	.1	Sub Bidang Pendataan dan Penetapan	BPAD2.1
	.2	Sub Bidang Layanan dan Keberatan	BPAD2.2
	.3	Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan	BPAD2.3
3	BIDANG PENDAPATAN II		BPAD3
	.1	Sub Bidang Pendapatan dan Penerimaan I	BPAD3.1
	.2	Sub Bidang Pendapatan dan Penerimaan II	BPAD3.2
	.3	Sub Bidang Pendapatan dan Penerimaan III	BPAD3.3
4	BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN PENATAUSAHAAN ASET		BPAD4
	.1	Sub Bidang Analisa dan Kebutuhan	BPAD4.1
	.2	Sub Bidang Penatausahaan Aset	BPAD4.2
	.3	Sub Bidang Penetapan Status dan Penilaian Aset	BPAD4.3
5	BIDANG PEMANFAATAN, PEMINDAH TANGANAN, DAN PENGAMANAN ASET		BPAD5
	.1	Sub Bidang Pemanfaatan Aset	BPAD5.1
	.2	Sub Bidang Pemindah tanginan dan Penghapusan Aset	BPAD5.2
	.3	Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian	BPAD5.3

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	Sengketa Aset		
6	UPTD...		UBPAD1....
32	<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>BKUD</b>
1	SEKRETARIAT		BKUD1
.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi		BKUD1.1
.2	Sub Bagian Keuangan		BKUD1.2
.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		BKUD1.3
2	BIDANG ANGGARAN		BKUD2
.1	Sub BidangPenyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan		BKUD2.1
.2	Sub BidangPenyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan		BKUD2.2
.3	Sub BidangPenyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum		BKUD2.3
3	BIDANGPERBENDAHARAAN		BKUD3
.1	Sub BidangPembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum		BKUD3.1
.2	Sub BidangPembayaran bidang perekonomian dan pembangunan		BKUD3.2
.3	Sub BidangPengelolaan Kas dan Pembinaan Bendahara		BKUD3.3
4	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN		BKUD4
.1	Sub BidangAkuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan		BKUD4.1
.2	Sub BidangAkuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan		BKUD4.2
.3	Sub BidangAkuntansi Penyusunan Laporan Keuangan		BKUD4.3
5	BIDANGPEMBINAAN KABUPATEN/KOTA		KEUANGAN BKUD5

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.1	Sub BidangPembinaan dan Evaluasi Wilayah I	BKUD5.1
	.2	Sub BidangPembinaan dan Evaluasi Wilayah II	BKUD5.2
	.3	Sub BidangPembinaan dan Evaluasi Wilayah III	BKUD5.3
33	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		<b>BKD</b>
1	SEKRETARIAT		BKD1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	BKD1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	BKD1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	BKD1.3
2	BIDANG PERENCANAAN, PENDIDIKAN DAN SISTEM INFORMASI PEGAWAI		BKD2
	.1	Sub BidangPerencanaan danFormasi Pegawai	BKD2.1
	.2	Sub BidangSistem Informasi Pegawai	BKD2.2
	.3	Sub BidangPendidikan Aparatur	BKD2.3
3	BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI		BKD3
	.1	Sub BidangJabatan Fungsional Tertentu	BKD3.1
	.2	Sub Bidang Jabatan Struktural	BKD3.2
	.3	Sub BidangPenilaian Kompetensi dan Kinerja	BKD3.3
4	BIDANG MUTASI PEGAWAI DAN PENSIUN PEGAWAI		BKD4
	.1	Sub BidangKenaikan Pangkat	BKD4.1
	.2	Sub Bidang Pemindahan dan Pensiu Pegawai	BKD4.2
	BIDANGDISIPLIN DANKORPRI		BKD5
	.1	Sub BidangDisiplin pegawai	BKD5.1
	.2	Sub BidangKesejahteraan pegawai	BKD5.2
	.3	Sub BidangKorpri	BKD5.3
6	UPTD		UBKD.1.
34.	<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA</b>		<b>BPSDMD</b>

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	<b>MANUSIA DAERAH</b>		
1	SEKRETARIAT		BPSDMD1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	BPSDMD1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	BPSDMD1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	BPSDMD1.3
2	BIDANG KOMPETENSI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL		BPSDMD2
	.1	Sub Bidang Pelatihan Dasar	BPSDMD2.1
	.2	Sub Bidang Pelatihan Kepemimpinan	BPSDMD2.2
	.3	Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Kultural	BPSDMD2.3
3	BIDANG KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL		BPSDMD3
	.1	Sub Bidang Teknis	BPSDMD3.1
	.2	Sub Bidang Fungsional	BPSDMD3.2
	.3	Sub Bidang Kurikulum dan Perangkat	BPSDMD3.3
4	BIDANG SERTIFIKASI DAN KELEMBAGAAN		BPSDMD4
	.1	Sub Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan	BPSDMD4.1
	.2	Sub Bidang Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi	BPSDMD4.2
	.3	Sub Bidang Sarana dan Prasarana	BPSDMD4.3
5	UPTD...		UBPSDMD1...
35.	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>		<b>BPBD</b>
1	SEKRETARIAT		BPBD1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	BPBD1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	BPBD1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	BPBD1.3
2	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		BPBD2
	.1	Seksi Pencegahan	BPBD2.1
	.2	Seksi Kesiapsiagaan	BPBD2.2
3	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK		BPBD3

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.1	Seksi Kedaruratan	BPBD3.1
	.2	Seksi Logistik	BPBD3.2
4	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI		BPBD4
	.1	Seksi Rehabilitasi	BPBD4.1
	.2	Seksi Rekonstruksi	BPBD4.2
5	UPTD...		UBPBD1...
36.	<b>BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>		<b>BPD</b>
1	SUB BAGIAN TATA USAHA		BPD1
2	SUB BIDANGHUBUNGAN ANTAR LEMBAGA		BPD2
3	SUB BIDANGPROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI		BPD3
4	SUB BIDANGPEMBINAAN MASYARAKAT DAN KEHUMASAN		BPD4
37.	<b>BADAN PENGELOLA PERBATASAN</b>		<b>BATAS</b>
1	SEKRETARIAT		BATAS1
	.1	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	BATAS1.1
	.2	Sub Bagian Keuangan	BATAS1.2
	.3	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	BATAS1.3
2	BIDANG PENGELOLAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA		BATAS2
	.1	Sub BidangPengelolaan Perbatasan Antar Negara	BATAS2.1
	.2	Sub BidangBatas dan Yuridiksi Wilayah Antar Negara	BATAS2.2
3	BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN		BATAS3
	.1	Sub BidangPotensi KawasanPerbatasan Darat Dan laut	BATAS3.1
	.2	Sub BidangPenataan Ruang Kawasan	BATAS3.2

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
4	BIDANG PENGELOLAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA		BATAS4
	.1 Sub Bidang InfrastrukturFisik		BATAS4.1
	.2 Sub Bidang Infrastruktur Pemerintahan, Ekonomi dan Kesra		BATAS4.2
5	BIDANG PENEGASAN BATAS DAERAH		BATAS5
	.1 Sub BidangPenegasan batas daerah kabupaten /Kota		BATAS5.1
	.2 Sub BidangFasilitasi perselisihan batas daerah kabupaten / kota		BATAS5.2
38.	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		<b>KESBANG</b>
1	SEKRETARIAT		KESBANG1
	.1 Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi		KESBANG1.1
	.2 Sub Bagian Keuangan		KESBANG1.2
	.3 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		KESBANG1.3
2	BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN		KESBANG2
	.1 Sub BidangBina Ideologi		KESBANG2.1
	.2 Sub BidangWawasan Kebangsaan		KESBANG2.2
3	BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL		KESBANG3
	.1 Sub BidangKewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Dan Lembaga Asing		KESBANG3.1
	.2 Sub BidangPenanganan Konflik		KESBANG3.2
4	BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI		KESBANG4
	.1 Sub BidangKetahanan Seni dan Budaya		KESBANG4.1
	.2 Sub Bidang Ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi		KESBANG4.2
5	BIDANG POLITIK		KESBANG5

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH		KODE
	.1	Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik	KESBANG5.1
	.2	Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu	KESBANG5.2
39.	<b>RSUD W.Z. JOHANNES KUPANG</b>		<b>RSUD</b>
1	WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIS		
	.1	BIDANG PELAYANAN MEDIS	RSUD1.1
		1 Sub Bidang Sumber Daya Pelayanan Medis	RSUD1.11
		2 Sub Bidang Mutu dan Etika Pelayanan Medis	RSUD1.12
	.2	BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN	RSUD1.2
		1 Sub bidang Sumber daya pelayanan keperawatan	RSUD1.21
		2 Sub bidang Mutu dan etika pelayanan keperawatan	RSUD1.22
	2	WAKIL DIREKTUR PENUNJANG PELAYANAN	
2	.1	BIDANG PENUNJANG PELAYANAN	RSUD2.1
		1 Sub bidang Sumber daya penunjang pelayanan	RSUD2.11
		2 Sub bidang Mutu dan etika penunjang pelayanan	RSUD2.12
	.2	BIDANG PENGEMBANGAN	RSUD2.2
		1 Sub bidang Pendidikan, pelatihan dan penelitian	RSUD2.21
		2 Sub bidang Marketing dan customer care	RSUD2.22
3	WAKIL DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM		
	.1	BAGIAN SEKRETARIAT	RSUD3.1
	1	Sub Bagian Umum	RSUD3.11
	2	Sub Bagian Kepegawaian	RSUD3.12
	3	Sub Bagian Hukum Dan Hubungan	RSUD3.13

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH			KODE
		Masyarakat		
.2	BAGIAN PERENCANAAN			RSUD3.2
	1	Sub bagian perencanaan dan penganggaran		RSUD3.21
	2	Sub bagian Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan		RSUD3.22
.3	BAGIAN KEUANGAN			RSUD3.3
	1	Sub bagian Perbendaharaan		RSUD3.31
	2	Sub bagian akuntansi Sub bagian verifikasi		RSUD3.32

*b* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

*VB*

*l* VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

*h*

*nl*

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : TAHUN 2019  
 TANGGAL : 2019

### TEKNIK PENCANTUMAN NOMOR

Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat, meliputi surat edaran, surat dinas/ surat biasa, surat keterangan, surat perintah, surat pengantar, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, surat kuasa, surat undangan, surat keterangan melaksanakan tugas, surat keterangan, nota dinas, nota pengajuan konsep naskah dinas, telaahan staf, pegumuman, laporan, rekomendasi, telegram, berita acara, notulen, piagam, sertifikat, STTP dan piagam.

Cara penulisan :

Nomor Kode Klasifikasi/ Nomor Urut/ Nomor Kode PD/UPTD/Cabang Dinas.

Contoh:

Surat dinas/surat biasa dari Biro Organisasi mengenai pelayanan publik yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

JENIS NOMOR	NOMOR KODE	KETERANGAN
Nomor Kode Klasifikasi (permasalahan pelayanan publik)	067	Diisi oleh petugas/ pelaksana pada Biro Organisasi
Nomor Urut	78	Diisi oleh petugas TU pada biro Organisasi
Nomor Kode PD	BO21	Diisi oleh petugas/ pelaksana pada Biro Organisasi
Nomor Naskah Dinas surat dinas/surat biasa adalah sebagai berikut: 067/ 78/ BO2.1		

Instruksi Gubernur.

Cara penulisan :

Nomor Kode Klasifikasi/ Nomor Urut/ Nomor Kode PD/UPTD/Cabang Dinas

Contoh:

Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular.

JENIS NOMOR	NOMOR KODE	KETERANGAN
Nomor Kode Klasifikasi (permasalahan penyakit menular)	443	Diisi oleh petugas/ pelaksana pada Dinkes
Nomor Urut	02	Diisi oleh petugas TU pada Dinkes
Nomor Kode PD	Dinkes3.2	Diisi oleh petugas/ pelaksana pada Biro Dinkes
Nomor Instruksi Gubernur adalah sebagai berikut: 443/02/dinkes3.2		

Naskah Perjanjian yang ditandatangani oleh Gubernur.

Cara penulisan :

Nomor Kode Klasifikasi/ Nomor urut/ Nomor Kode Perjanjian/ Tahun Pembuatan.

Contoh : Perjanjian Bidang Tata Lingkungan Persampahan.

JENIS NOMOR	NOMOR KODE	KETERANGAN
Nomor Kode Klasifikasi	660	Diisi oleh petugas/pelaksana pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama
Nomor Urut	09	
Nomor Kode Perjanjian	PERJ-1	
Tahun Pembuatan	2019	
Nomor Naskah Perjanjian adalah sebagai berikut:		
660/09/Perj-I/ 2019		

Naskah Perjanjian yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran.

Cara penulisan :

Nomor Kode Klasifikasi/Nomor Urut/ Nomor Kode PD/UPTD/Cabang Dinas/ Tahun pembuatan.

JENIS NOMOR	NOMOR KODE	KETERANGAN
Nomor Kode Klasifikasi	660	Diisi oleh petugas/pelaksana pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama
Nomor Urut	09	
Nomor Kode PD	Eks12	
Tahun Pembuatan	2019	
Nomor Naskah Perjanjian adalah sebagai berikut:		
660/09/Eks12/ 2019		

Standarisasi penomoran Naskah Dinas UPT :

Contoh penulisan :

425/10/UpPK11

*b* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *b*

*VB*

*l* VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : TAHUN 2019  
TANGGAL : 2019

**NOMOR KODE PERJANJIAN**

<b>KODE PERJANJIAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
PERJ- I	PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
PERJ-II	PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
PERJ-III	PERJANJIAN KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BINGTILU LAISKODAT